

SKRIPSI

TRADISI JIMPITAN SEBAGAI JAMINAN SOSIAL TRADISIONAL DI DESA TAMBAKMERANG KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH



Disusun Oleh:

ANISA NURAINI

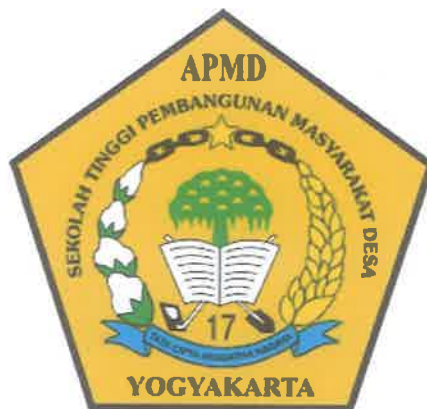
NIM 21510003

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

SKRIPSI

TRADISI JIMPITAN SEBAGAI JAMINAN SOSIAL TRADISIONAL DI DESA TAMBAKMERANG KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH



Disusun Oleh:

ANISA NURAINI

NIM 21510003

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Jam : 11.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.

Ketua Penguji/Pembimbing

Dra. Oktarina Albizzia, M.Si.

Penguji Samping I

Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A.

Penguji Samping II

Mengetahui

a.n. Ketua Program Studi Pembangunan Sosial

Sekretaris

Hery Purnomo, S.Sos., M.P.A.

NIY 170 230 258

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisa Nuraini
NIM : 21510003
Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul TRADISI JIMPITAN SEBAGAI JAMINAN SOSIAL TRADISIONAL DI DESA TAMBAKMERANG KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya menyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 10 Juni 2025
Yang Menyatakan



Anisa Nuraini
NIM 21510003

MOTTO

Fa inna ma'al-'usri yusroo

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah Ayat 5)

Lalu apa yang kamu cemas? Mengalirlah seperti air. Bawa saja semuanya. Hadapi.

Alirkan semuanya hanya menuju kepada Zat Pemelihara. Semata hanya kepada Dia.

Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain.

(Rusdi Mathari)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'*, No. 3289)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai target yang telah ditentukan. Selain itu, dengan perasaan kebahagiaan dan kebanggaan, skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang senantiasa memberi dukungan, doa, semangat dan kerjasama kepada saya selama proses pendidikan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

1. Saya persembahkan Skripsi ini untuk orang tua tercinta saya, mamak dan bapak.
Terimakasih untuk segala dukungan yang tak ada habisnya untuk saya, terimakasih telah memberikan cinta kasih dan doa terbaik untuk saya. Terimakasih telah menjadi orang tua dan tempat terbaik disaat saya berada di dalam situasi, keadaan, permasalahan dan rintangan dalam menjalani kehidupan. Ucapan terimakasih yang tulus saya haturkan. Sungguh, tanpa doa tulus dan restu yang tak terhingga dari mamak dan bapak tercinta, rasanya tidak mungkin saya masih berpijak di bumi ini untuk terus melangkah dan bisa berada di titik ini. Kehadiran mamak dan bapak adalah kekuatan dan cahaya terang yang senantiasa membimbing dan menyertai setiap langkah saya.
2. Saya persembahkan Skripsi ini untuk keluarga besar saya, kakak saya Nur Muhamad, sepupu saya Ifran Dani Priharyanto, simbok dan simbah, serta kerabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa yang tidak pernah terhenti kepada saya.

3. Saya persembahkan skripsi ini untuk Aiffa Salsabila Anique, gadis yang menggemaskan berusia 7 tahun yang selalu penasaran dengan hal-hal baru dan selalu menyemangati saya.
4. Saya persembahkan Skripsi ini kepada jiwa yang sabar dan penuh kasih, yang telah menjadi saksi dan pendamping setia saya sejak hari pertama perkuliahan hingga terwujudnya karya ini.
5. Saya persembahkan Skripsi ini kepada Aunty Lastri yang telah memberikan support, doa dan dukungannya, kehadiran Aunty selalu menjadi pendorong saya untuk terus berjuang dalam menempuh Pendidikan ini.
6. Saya persembahkan Skripsi ini dengan penuh rasa hormat kepada Dosen Pembimbing saya, Ibu Dra. MC. Candra Rusmala D., M.Si., yang selalu sabar dalam mengarahkan serta membimbing saya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya, berkat beliau ada banyak hal-hal baru yang saya ketahui baik itu ilmu buku, ilmu laku maupun ilmu kehidupan.
7. Saya persembahkan Skripsi ini untuk dosen penguji Skripsi Ibu Dra. Oktarina Albizzia, M.Si. dan Ibu Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A. yang telah menguji Skripsi saya dan memberikan masukan-masukan membangun, sehingga Skripsi ini menjadi tulisan yang lebih baik.
8. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan saya, NIM 21510001, 21510006, dan 21510005, terima kasih atas setiap dukungan, tawa, dan semangat yang kalian berikan, mulai dari awal perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan.

9. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2021, terutama mahasiswa/i Prodi Pembangunan Sosial yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya, baik secara lisan maupun tulisan. Setiap momen bersama kalian adalah cerita indah masa kuliah yang akan selalu terkenang.
10. Terima kasih kepada Pemerintah Desa Tambakmerang, Pak kepala desa dan seluruh Pamong Desa Tambakmerang yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan maksimal.
11. Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan juga kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Almamater inilah yang telah menjadi wadah bagi saya untuk terus berkembang, dengan membuka pintu seluas-luasnya bagi berbagai kegiatan pembelajaran dan eksplorasi, baik di dalam maupun di luar kampus, dan dalam interaksi dengan masyarakat maupun pemerintah. Segala kesempatan, dukungan, dan doa dari APMD sangat berarti bagi saya.
12. Terakhir, namun yang paling utama, saya ingin berterima kasih kepada seorang perempuan hebat yang tidak pernah menyerah, meskipun terkadang keras kepala. Terima kasih karena telah percaya pada diri ini. Terima kasih karena telah melakukan semua kerja keras ini. Terima kasih karena tidak pernah libur dan terus berusaha. Terima kasih telah berjuang sejauh ini, dan terima kasih untuk tidak menyerah, meskipun terkadang semesta tidak berpihak. Terima kasih, diriku sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul Tradisi Jimpitan sebagai Jaminan Sosial Di Desa Tambakmerang Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dengan tepat waktu. Tentu, tanpa pertolongan-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan target yang telah ditentukan. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti.

Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara moral maupun materi. Sementara itu, penulis benar-benar menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan dipelajari lebih dalam. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan Skripsi ini. Meskipun demikian, kelancaran pada proses penyusunan Skripsi ini berkat bimbingan, arahan, petunjuk, dan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari tahap persiapan, penyusunan, hingga penyelesaian Skripsi. Untuk itu, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dra. MC. Candra Rusmala D., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dan

selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis mulai dari proses penyusunan hingga penyelesaian Skripsi ini.

3. Ibu Dra. Oktarina Albizzia, M.Si. selaku Dosen Penguji Samping I pada sidang Skripsi yang telah memberikan masukan-masukan membangun dan sangat berguna dalam perbaikan Skripsi ini.
4. Ibu Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A. selaku Dosen Penguji Samping II pada sidang Skripsi yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis terkait penyusunan dan perbaikan Skripsi ini.
5. Ibu Ratna Sosetya Widadjati, S.Psi., M.Psi. selaku Dosen Pembimbing Akademik sedari awal perkuliahan selalu mendukung, mendorong, dan membimbing penulis untuk mengikuti dan mengeksplorasi kegiatan luar kampus yang menambah value serta softskill penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis, sehingga harapannya penulis dapat mengimplementasikan seluruh ilmu pengetahuan yang didapat ke dalam lingkungan sekitar.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang selalu memberikan ilmu serta dukungan terus-menerus kepada penulis sejak duduk di bangku perkuliahan hingga sampai saat ini.
8. Pemerintah Desa Tambakmerang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian terkait tradisi Jimpitan.

Semoga Skripsi berjudul Tradisi Jimpitan Sebagai Jaminan Sosial Di Desa Tambakmerang Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah ini dapat menambah dan meningkatkan wawasan bagi para pembacanya dan dapat bermanfaat untuk perkembangan serta peningkatan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. KERANGKA TEORI.....	8
1. Tradisi Jimpitan	8
2. Jaminan Sosial Tradisioanal	12
3. Persepsi	25
E. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27

2.	Ruang Lingkup Penelitian	28
3.	Subjek Penelitian	33
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	34
5.	Teknik Analisis Data	40
BAB II		42
DESKRIPSI WILAYAH		42
A.	Sejarah Desa	42
B.	Kondisi Geografis.....	43
1.	Letak dan Luas Wilayah	43
2.	Topografi dan Jenis Tanah.....	44
3.	Iklim.....	44
C.	Keadaan Umum Desa Tambakmerang.....	44
1.	Keadaan Pemerintahan	45
D.	Keadaan Demografis	46
1.	Jumlah Penduduk	46
2.	Jumlah Keluarga	51
3.	Angkatan Kerja	52
4.	Keadaan Sosial.....	54
E.	Keadaan Ekonomi	59
1.	Investasi Pemerintah Desa	59
2.	Pertanian, Perikanan dan Peternakan.....	59
3.	Perindustrian	60
4.	Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	60
F.	Keadaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa.....	60
G.	Tradisi Jimpitan di Desa Tambakmerang.....	62

BAB III.....	66
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	66
A. Deskripsi Informan	66
1. Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	68
2. Jumlah Informan Berdasarkan Umur	68
3. Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	69
4. Jumlah Informan Berdasarkan Status	70
5. Jumlah Informan Berdasarkan Dusun.....	70
B. Analisis Data	71
1. Tradisi Jimpitan Sebagai Jaminan Sosial Tradisional Di Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah	72
2. Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Jimpitan Dalam Konteks Jaminan Sosial Tradisional.....	95
BAB IV	106
PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA	116
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA TRADISI JIMPITAN	118
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN <i>STAKEHOLDER</i>	121
DOKUMENTASI KEGIATAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kelebihan dan Kekurangan.....	19
Tabel 1.2 Perbedaan Jaminan Sosial Formal & Tradisional	22
Tabel 1.3 Tempat dan Tanggal Observasi.....	35
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Tahun 2023	46
Tabel 2.2 Besaran Investasi Pembangunan Pemerintah Desa Tambakmerang pada tahun 2022 sampai dengan 2023	59
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Desa Tambakmerang	61
Tabel 3.1 Deskripsi Berdasarkan Data Informan	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Desa Tambakmerang Menurut Jenis Kelamin per RW Tahun 2023 (dalam jiwa)	48
Grafik 2.2 Jumlah penduduk Desa Tambakmerang berdasarkan kelompok umur tahun 2023	49
Grafik 2.3 Jumlah penduduk Desa Tambakmerang berdasarkan pendidikan tahun 2023	50
Grafik 2.4 Jumlah keluarga menurut wilayah, tahun 2023	51
Grafik 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kerja pada tahun 2023	52
Grafik 2.6 Jumlah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan	53
Grafik 2.7 Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Agama	54
Grafik 2.8 Jumlah Penduduk Miskin Desa Tambakmerang pada tahun 2023	57
Grafik 3.1 Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Grafik 3. 2 Jumlah Informan Berdasarkan Umur	69
Grafik 3.3 Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
Grafik 3.4 Jumlah Informan Berdasarkan Status	70
Grafik 3.5 Jumlah Informan Berdasarkan Lokasi	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Desa Tambakmerang	43
Gambar 2.2 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Tambakmerang	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengingat statusnya sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang signifikan, Indonesia masih terus berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks. Meskipun telah dicapai kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan ekonomi dan sosial tetap menjadi tantangan utama. Untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, pemerintah Indonesia telah merancang dan mengimplementasikan berbagai program jaring pengaman sosial dalam jaminan sosial.

Jaring pengaman sosial memiliki konotasi yang lebih luas dibandingkan dengan jaminan sosial. Jaring pengaman sosial mencakup seluruh rangkaian program dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial, seperti kemiskinan, penyakit, pengangguran dan bencana alam. Sementara itu, jaminan sosial merupakan bagian dari Jaring pengaman sosial yang lebih spesifik. Jaminan sosial biasanya mengacu pada sistem yang lebih formal dan terstruktur, di mana individu atau kelompok masyarakat tertentu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial tertentu, seperti pensiun, asuransi kesehatan, dan tunjangan pengangguran. (Rys, V. 2011). Kaidah tersebut, mengandung muatan baku yang mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial yang layak bagi kemanusiaan. Mengingat bahwa jaminan sosial berperan sebagai salah satu faktor penentu yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi warga

masyarakat dan keluarganya, maka dapat dikatakan bahwa jaminan sosial pada sesungguhnya merupakan bagian integral dari kebijakan makro yang berfokus pada kesejahteraan sosial, dan diterapkan berdasarkan komponen hak asasi manusia yang memiliki dimensi lebih luas bagi hak dan martabat manusia. (Johannes, Ferry. 2003).

Keberhasilan dalam membangun sistem Jaminan sosial yang efektif, tentunya akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia. Tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas sosial dan politik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus berkomitmen untuk memperkuat dan mengembangkan program-program Jaminan sosial, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi permasalahan sosial di Indonesia.

Jaminan sosial di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan atau termasuk kelompok rentan, seperti keluarga berpenghasilan rendah, individu lanjut usia, difabel, serta anak-anak. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan bentuk-bentuk bantuan sosial tunai lain sebagainya merupakan contoh nyata dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut. Melalui program-program ini, pemerintah berusaha meringankan tekanan ekonomi masyarakat miskin, meningkatkan akses mereka terhadap layanan dasar seperti kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Namun, implementasi Jaminan sosial di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Seperti akurasi data penerima manfaat, efisiensi penyaluran bantuan, dan

koordinasi antar lembaga merupakan beberapa kendala yang harus segera diatasi. Selain itu, keberlanjutan pembiayaan program-program ini juga menjadi perhatian penting. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan perbaikan sistem penyaluran bantuan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, Jaminan sosial merupakan bagian yang penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Konsep Jaminan sosial ini sebenarnya tidak hanya mencakup program-program pemerintah yang bersifat formal, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Sembako, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk bantuan sosial yang lebih tradisional dan informal. Pada pengertian yang lebih luas, Jaminan sosial mencakup seluruh bentuk dukungan dan bantuan yang disalurkan kepada perorangan atau segmen masyarakat yang mengalami kesulitan atau membutuhkan perlindungan. Ini termasuk jaminan sosial tradisional berupa bantuan tenaga, moral, dan material mencakup skala rumah tangga hingga dalam konteks lingkungan yang lebih besar seperti desa, rukun tetangga, dan rukun warga. Semangat kekeluargaan yang kuat mendorong generasi muda untuk memberikan dukungan kepada generasi tua, sementara semangat gotong royong akan menumbuhkan rasa saling membantu di antara warga masyarakat. (Mawardi, M. F., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024).

Adanya perbaikan dan inovasi, diharapkan program-program Jaminan sosial dapat semakin efektif dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan. Kombinasi antara program-program pemerintah yang terstruktur dengan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial

yang telah tertanam dalam masyarakat Indonesia, mampu mengembangkan sistem perlindungan sosial yang lebih tangguh dan terus berkelanjutan. Di era modern, penting untuk terus mengembangkan dan menyesuaikan program-program Jaminan sosial agar tetap relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Kendatipun pemerintah nasional telah berupaya keras untuk memperluas cakupan jaminan sosial, namun faktanya masih banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan kelompok marginal, yang belum terlayani dengan maksimal. Indikasi ini tercermin dengan adanya temuan-temuan informasi dari Menko PMK yang menyampaikan "Masalah belum meratanya bansos ini disebabkan oleh data yang belum sempurna," (Mega, Deti, P. 2021). Serta diperkuat dengan masih terjadinya fenomena masyarakat yang meninggal akibat kelaparan. Sebagaimana berita kematian satu keluarga di Kalideres ditemukan meninggal dunia, dengan hasil autopsi meninggal dunia dalam keadaan kering kelaparan. (Amalia, Mita, H. 2022.). Tak hanya satu kasus saja, kemudian kembali muncul Puluhan warga Yahukimo Papua ditemukan meninggal dunia karena kelaparan (Cendrawasih, Kodam. 2023). Banyaknya kasus kurang meratanya bantuan sosial yang disambung dengan adanya kematian akibat kelaparan ternyata masih sering kita dengar, baik dari berita lokal maupun berita nasional. Di zaman yang serba cepat ini, meninggalkan akibat kelaparan merupakan suatu fenomena yang sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, terutama akses terhadap pangan.

Implementasi jaminan sosial yang belum merata ini menyebabkan sebagian masyarakat belum terlindungi. Fenomena ini menunjukkan adanya disfungsi dalam sistem jaminan sosial nasional, dimana seharusnya negara hadir untuk melindungi seluruh warganya dari ancaman kematian akibat kelaparan dan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, namun hingga saat ini juga masih terjadi adanya ketimpangan jaminan sosial.

Adanya ketimpangan jaminan sosial yang masih terjadi, Tradisi Jimpitan menjadi sangat relevan sebagai bentuk jaminan sosial tradisional yang berakar kuat di masyarakat. Penelitian mengenai tradisi Jimpitan ini memiliki urgensi tinggi karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai potensi lokal dan kearifan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan sosial mandiri. Di tengah keterbatasan jaminan sosial formal, inisiatif seperti tradisi Jimpitan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya tahan dan kemampuan untuk membangun jaringan pengaman sosialnya sendiri, yang seringkali lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik anggotanya.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kontribusinya untuk memahami dinamika internal dan keberlanjutan jaminan sosial yang berbasis komunitas. Dengan mengkaji jimpitan, peneliti melihat bagaimana nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial dihidupkan melalui praktik sehari-hari untuk mengatasi kerentanan. Penemuan dari penelitian ini akan memperkaya pengetahuan tentang salah satu model-model jaminan sosial tradisional yang efektif di tingkat lokal. Ini krusial untuk mengapresiasi dan juga melestarikan kearifan lokal yang telah terbukti mampu

memberikan perlindungan dan dukungan bagi masyarakat di tengah keterbatasan sistem yang telah ada.

Mempertimbangkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian pada salah satu Jaminan sosial tradisional yang berasal dari inisiasi masyarakat desa yang ditinjau melalui perspektif kesejahteraan sosial dengan judul: "Tradisi Jimpitan Sebagai Jaminan Sosial Tradisional Di Desa Tambakmerang Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah".

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dapat diartikan sebagai metode yang digunakan dalam penulisan kalimat yang menanyakan masalah penelitian yang berasal dari eksplorasi latar belakang masalah. Pertanyaan-pertanyaan ini dirumuskan berupa kalimat pertanyaan yang berhubungan dengan judul dan juga permasalahan penelitian (Sakti, B. P. 2022). Mengacu pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana tradisi Jimpitan sebagai jaminan sosial tradisional di Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang tradisi Jimpitan dalam konteks jaminan sosial tradisional?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Menurut Ramdhan (2021) tujuan penelitian merujuk pada hasil yang diharapkan, atau sesuatu yang akan diperoleh melalui proses penelitian, dan merupakan sesuatu dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Maka dari itu, peneliti memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui tradisi Jimpitan sebagai jaminan sosial tradisional di tingkat desa.
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang tradisi Jimpitan dalam konteks jaminan sosial tradisional.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu kegunaan yang dihasilkan dari adanya proses penelitian, baik bagi pengembangan kepentingan dunia akademis melalui pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun untuk memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dalam merumuskan keputusan. Maka, berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat bidang akademik dan implikasi praktis yang diantaranya:

- a. Manfaat Akademik
 - 1) Melalui penelitian ini, diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam sub-bidang Jaminan Sosial di tingkat Desa yang mungkin belum banyak diteliti sebelumnya.

- 2) Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa mengidentifikasi celah-celah atau isu-isu yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya, sehingga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Melalui penelitian ini, penulis berkesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang didapatkan selama perkuliahan atau studi menjadi konteks nyata. Serta penulis dapat mengembangkan berbagai keterampilan penelitian, seperti perancangan penelitian, pengumpulan data, analisis data dan penulisan ilmiah.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi dan wawasan baru tentang tradisi Jimpitan sebagai jaminan sosial di tingkat desa.

D. KERANGKA TEORI

1. Tradisi Jimpitan

Wardhana (dalam Hasyim, M. 2014), Tradisi jimpitan adalah satu wujud kearifan lokal yang tetap dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat desa di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Kata "jimpitan" sendiri berasal dari kata "*jumputan*" yang memiliki makna mengambil. Praktik tradisi Jimpitan ini melibatkan pengumpulan sumbangan, biasanya dalam bentuk beras atau uang, yang secara sukarela berasal dari warga. Uniknya, pengumpulan jimpitan ini dilakukan dengan cara yang sederhana namun efektif. Warga akan menyediakan wadah kecil di depan rumah mereka, seperti gelas bekas, pot atau kaleng kecil,

untuk diisi dengan sumbangan. Meskipun jumlahnya sedikit, namun semangat dan makna gotong royong yang terkandung dalam tradisi ini sangatlah besar. (Hasyim, M. 2014)

Hasyim, M. (2014) Juga menyampaikan, di balik tradisi Jimpitan tersimpan nilai-nilai luhur seperti kerelaan, kepedulian, dan tentunya gotong royong. Praktik tradisi jimpitan ini, warga secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan bersama. Sumbangan yang terkumpul kemudian digunakan untuk berbagai keperluan sosial masyarakat, seperti membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, pada saat masyarakat mengadakan hajatan kelahiran, pernikahan, serta kematian, atau untuk acara-acara kampung. Melalui jimpitan, masyarakat diajarkan untuk saling berbagi dan bahu-membahu dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Seiring berjalannya waktu, tradisi Jimpitan mengalami beberapa perubahan. Jika dulu sumbangan yang dikumpulkan hanya berupa beras, kini banyak warga yang juga memberikan sumbangan dalam bentuk uang receh. Meskipun bentuk pelaksanaan Jimpitan telah beralih demikian, semangat gotong royong yang menjadi dasar dari tradisi ini masih tetap terjaga. Jimpitan menjadi bukti bahwa nilai-nilai luhur dapat terus dilestarikan meskipun zaman terus berubah. (Hasyim, M. 2014)

Harsono, W. (2014), menyebutkan bahwa Jimpitan yang bersasal dari “*jumputan*” atau dalam bahasa Indonesia “menjumput”, memiliki makna kata memungut. Praktik dari tradisi Jimpitan dilakukan dengan mengambil sumbangan berupa beras atau uang yang dikumpulkan secara beramai-ramai oleh

masyarakat desa. Seiring dengan berjalannya waktu, praktik Jimpitan saat ini telah memiliki perubahan, yakni yang dulunya menggunakan beras sebagai objek, kini telah berangsur beralih menjadi uang. Hal ini terjadi bukan karena alasan, melainkan adanya peralihan dari beras menjadi uang sangat membantu dalam proses pengelolaan dan pemanfaatannya.

Masyarakat menyebutkan istilah Jimpitan berasal dari cara pengambilan beras atau uang receh dengan metode pengambilan dengan *dijimpit*, yaitu atinya mengambil dengan cara dijumput dengan menggunakan tangan. Harjowinoto (2013) (dalam Setyawan, B. W., & Nuro'in, A. S. (2021).) menyampaikan, Tradisi Jimpitan ialah salah satu tradisi yang masih dilakukan pada lingkungan masyarakat pedesaan atau komplek perkampungan. Tradisi Jimpitan dilakukan dengan cara setiap rumah atau keluarga mengumpulkan sejumlah beras yang kemudian diletakkan di dalam wadah kecil seperti kaleng kecil atau sebuah gelas dan sejenisnya. Beras tersebut kemudian diambil pengelola tradisi Jimpitan di desa tersebut di setiap waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Hasil dari tradisi jimpitan ini kemudian akan dikumpulkan yang nantinya akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat umum serta keperluan sosial lainnya.

Awal adanya tradisi Jimpitan ini diawali dengan menggunakan objek beras atau padi. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mengganti beras dengan uang, dengan alasan uang dianggap lebih praktis dan simple keberadaannya. (Sari et al, 2020). Serta dalam pelaksanaannya, tradisi jimpitan ini dilakukan dengan sukarela atau harapannya tidak membebani warga

masyarakat tentunya. Sehingga dalam hal ini, terdapat masyarakat yang tidak mampu untuk memberikan sumbangannya, maka tidak ada sanksi atau denda yang diterima. (Setyawan, B. W. 2021)

Menurut Harsono (2024:134), Jimpitan berasal dari kata “jumpitan” yang bermakna memungut. Sehingga Jimpitan ini dapat diartikan menjadi kegiatan memungut atau mengumpulkan beras yang dilakukan beramai-ramai. Tradisi Jimpitan pada era sekarang sudah berubah menjadi uang. Hal ini dilakukan bukan karena tanpa alasan, hal ini dilakukan karena uang dianggap lebih mudah di setiap pengelolaan dan pemanfaatannya. (Setyawan, B. W., & Nuro'in, A. S. 2021)

Menurut Rohmah, K.N.R. (2023) Jimpitan adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan atau masyarakat di perkampungan. Jimpitan ini dilakukan dengan cara yang cukup sederhana, yakni setiap rumah meletakkan beras sejumput atau dengan memungut beras yang dimiliki dengan tangan dan kemudian dimasukkan ke dalam kaleng, ataupun gelas air minum kemasan atau melalui media lain selain beras yaitu dengan menggunakan uang koin ataupun uang kertas seikhlasnya.

Adapun nilai dan makna yang terkandung dalam tradisi Jimpitan ialah nilai-nilai keikhlasan dalam jiwa setiap individu. Nilai-nilai ini dapat terlihat pada saat warga menyisihkan sedikit beras yang dimiliki ataupun uangnya dengan ikhlas, untuk turut serta dalam tradisi Jimpitan ini. Tak hanya terdapat nilai keikhlasan, nilai-nilai kejujuran dan tanggungjawab juga harus terkandung dalam pelaksanaan tradisi Jimpitan ini. Hal ini dikarenakan tradisi Jimpitan perlu diatur dengan prinsip kejujuran dan akuntabilitas agar dana yang terkumpul dapat

dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga hasil dari Jimpitan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Tak cukup sampai disitu, nilai gotong royong juga menjadi salah satu nilai terpenting dalam tradisi Jimpitan ini dalam pemenuhan kebutuhan bersama.

2. Jaminan Sosial Tradisioanal

a. Pengertian Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 (1) menyatakan bahwa: Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dengan demikian, *social security* secara fundamental merupakan sebuah mekanisme proteksi sosial yang didesain untuk memitigasi aneka risiko, sehingga seluruh warga negara dapat dipastikan haknya dalam mengakses dan memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya secara memadai. Menurut Nurhadi, dkk. (2024) jaminan sosial mencakup dua aspek perlindungan, yakni bantuan finansial dan layanan sosial, seperti perawatan medis, yang diberikan ketika seseorang menghadapi risiko tertentu. Konsep ini juga dapat diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap kebutuhan dasar untuk mencapai taraf hidup yang layak.

Suharto, (2009) (dalam Putri (2013)) Jaminan sosial adalah salah satu bentuk dari perlindungan sosial. Sebagai bagian integral dari kebijakan sosial, perlindungan sosial sangat penting untuk menekan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan multidimensional. Pembahasan mengenai jaminan

sosial, tidak dapat terlepas dari permasalahan kemiskinan. Jaminan sosial, kini menjadi salah satu alternatif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Masyarakat miskin menjadi target utama dari program jaminan sosial karena masyarakat miskin merupakan salah satu dari kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kehidupan, baik dalam aspek ekonomi maupun dalam aspek sosial.

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 11 tahun 2020 pasal 1 ayat (1) “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.” Maksudnya jaminan sosial ialah sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan agar seluruh rakyat, tanpa terkecuali, dapat hidup dengan layak. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. (Indonesia, R. (2004)). Konteks jaminan sosial ini meliputi perlindungan bagi seluruh rakyat yang mencakup:

- 1) Perlindungan bagi seluruh rakyat. Jaminan sosial tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu saja, melainkan mencakup seluruh warga negara.
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar. Fokus utama adalah memastikan bahwa setiap orang berhak memiliki akses terhadap hal-hal yang esensial untuk hidup yang layak.
- 3) Kualitas hidup. Jaminan sosial memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dengan mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan rasa aman.

Secara harafiah jaminan sosia dari kata *security social*. *Security* (bahasa latin) dari kata *se*: pembebasan dan *curus*: kesulitan, sedangkan *social*: masyarakat. Sehingga jaminan sosial merupakan sebagai upaya pembebasan masyarakat dari suatu kesulitan. Seluruh sistem komprehensif yang diimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan warga negara, memastikan terpenuhinya kebutuhan sosial dasar. (Aco, F., & Widane, G. R. (2018)). Maka jaminan sosial dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan perlindungan untuk setiap anggota warga masyarakat.

b. Bentuk-Bentuk Jaminan Soisal

Penyelenggaraan jaminan sosial dapat dikaji melalui dua lensa utama. Pendekatan formal menekankan peran krusial pemerintah atau negara dalam menyediakan perlindungan sosial. Sebaliknya, pendekatan informal menunjukkan bagaimana jaminan sosial telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat melalui adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai keagamaan. Ini terwujud dalam berbagai bentuk, seperti praktik gotong royong, kegiatan saling menolong, serta saling membantu, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Contoh konkret dari pendekatan informal ini bisa berupa arisan di tingkat RT/RW, arisan keluarga, arisan kelompok pedagang kecil, atau bantuan tenaga saat tetangga membangun rumah dan lain-lain.

Menurut Rizal (2018) Bentuk-bentuk jaminan sosial terbagi menjadi 2 berdasarkan sistem dan mekanisme pelaksanaannya. Pertama, jaminan sosial formal atau dapat disebut dengan jaminan sosial modern, karena jaminan sosial

ini mengikuti template jaminan sosial yang dilakukan negara-negara maju pada saat ini. Kedua, jaminan sosial informal atau jaminan sosial tradisional.

Hal ini juga diungkapkan oleh Dekker (2005) dalam tesis Anggraini (2013), Secara garis besar, jaminan sosial dapat dikategorikan menjadi dua jenis: formal dan informal. Penting untuk dipahami bahwa pembagian ini tidak serta merta memisahkan jaminan sosial modern dari yang tradisional. Sebaliknya, perbedaan antara formal dan informal terletak pada tiga aspek krusial: bagaimana layanan didistribusikan, aturan atau sistem yang mengaturnya, serta bagaimana mendistribusikan keuntungan.

c. Jaminan Sosial Tradisional

Peyser (dalam Sumarnonugroho, 1987) Sebagai salah satu wujud jaminan sosial, fungsi utamanya dalam kehidupan berkelompok dan kehidupan bermasyarakat adalah menyediakan bantuan serta dukungan. Tindakan sosial ini krusial agar keberlangsungan kehidupan kelompok itu sendiri berjalan dengan baik. Rizal (2018) Risiko merupakan sebuah ketidakpastian yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak dapat menunggu sampai seluruh anggota masyarakat memiliki jaring pengaman berupa jaminan sosial dari pemerintah. Menurut Nordensvärd dan Ketola (2022) dalam Mumtaz et al, (2024), informalitas berfungsi sebagai fondasi semua kesejahteraan, yang menggaris bawahi hubungan integral antara kesejahteraan formal dan informal.

Pada dasarnya, masyarakat memiliki insting untuk melakukan mekanisme manajemen risiko baik berupa pencegahan maupun penanggulangan. Hal tersebut disebabkan karena adanya rasa kepedulian satu sama lain yang

dibuktikan dengan ikatan kekeluargaan yang kuat seperti yang dicontohkan oleh masyarakat di wilayah pedesaan. Jaminan sosial yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, tanpa campur tangan pemerintah disebut dengan jaminan sosial tradisional. Disebut tradisional, karena tidak adanya payung hukum resmi seperti Undang-Undang ataupun sejenisnya yang mengatur jaminan sosial ini. Masyarakatlah yang bertanggungjawab atas kesejahteraan anggotanya, Durkheim mengatakan bahwa hal ini mungkin terjadi mengingat adanya kolektifitas antar warga yang tinggi. Tingginya kolektifitas menurut Durkheim, termasuk ke dalam satu ciri dari solidaritas mekanik yang diidentikkan dengan masyarakat pedesaan.

Komunitas secara historis dan tradisional telah menjalankan jaminan sosial informal (*kinship social security*). Pendekatan informal sarat akan aspek pemberdayaan (*empowerment*), menumbuhkan ikatan emosional antarwarga yang pada gilirannya akan memperkuat mekanisme saling bantu diantara mereka. Setiap tantangan dan masalah yang dihadapi individu atau keluarga akan diselesaikan melalui semangat gotong royong dalam lingkup komunitas mereka. Anggota komunitas ini bisa terdiri dari kerabat dekat atau mereka yang memiliki ikatan emosional kuat melalui sistem bertetangga. (Mudiyono, 2022)

Menurut Tang, Mahmud, dkk. (2005) menyatakan bahwa Jaminan Sosial Tradisional dapat dipahami sebagai suatu sistem dukungan yang bersifat non-pemerintah dan berbasis pada warisan budaya, di mana bantuan atau perlindungan muncul dari berbagai ikatan sosial, termasuk antara kerabat,

tetangga, anggota komunitas, teman, dan dalam dinamika patron-klien dan lain sebagainya. (Muchlashin, A dan Hempri S (2023)).

Konsep dasar jaminan sosial tradisional adalah kekeluargaan, yang tercermin dalam pemberian bantuan di antara anggota keluarga dan di dalam lingkungan komunitas dan berakar pada adat istiadat. Jaminan sosial tradisional pada masyarakat tertentu memiliki mekanisme jaminan sosial yang berkaitan erat dengan siklus kehidupan, adanya kebutuhan pokok, pekerjaan, bencana alam, upacara keagamaan dan lain sebagainya. Di balik praktik tersebut, menurut Mumtaz et al, (2024) perlindungan sosial informal secara mendalam melibatkan beberapa elemen kunci, diantaranya:

- 1) "*Social Embeddedness*" atau Ketergantungan Sosial dalam Praktik Jaminan Sosial Tradisional: Warga masyarakat sangat mengandalkan dan terikat pada hubungan sosial mereka dalam memperoleh berbagai bentuk bantuan. Jaminan ini tidak datang dari institusi formal, melainkan tertanam kuat dalam jalinan interaksi dan ketergantungan antarindividu.
- 2) Solidaritas dan Jaringan Sosial sebagai Infrastruktur Sosial Alternatif: Dalam menghadapi krisis atau kesulitan, kelompok usia, organisasi keagamaan, keluarga besar, dan bahkan sistem seperti arisan, berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang vital. Warga masyarakat menyediakan dukungan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia melalui jalur formal.
- 3) Ekonomi Moral dan Norma Timbal Balik di Komunitas Lokal: terdapat nilai-nilai yang mendasari praktik jaminan sosial tradisional ini, seperti

"wajib membantu" atau norma timbal balik, yang diinternalisasi dan dijalankan secara turun-temurun. Bantuan tidak hanya diberikan berdasarkan kemampuan, tetapi juga kewajiban moral yang dirasakan.

- 4) Kesejahteraan Relasional: ketergantungan pada rasa aman dalam hubungan sosial: Lebih dari sekadar bantuan materi, warga juga mencari dan menemukan rasa aman serta kesejahteraan emosional dalam hubungan sosial mereka. Empati, perhatian, dan keterlibatan emosional dari komunitas menjadi bagian integral dari sistem bantuan ini.

Dari empat elemen tersebut, dapat diartikan bahwa jaminan sosial tradisional bukan hanya sekadar mekanisme bantuan yang bersifat transaksional saja, melainkan fondasi kokoh yang terbangun dari adanya keterikatan sosial yang mendalam (*social embeddedness*). Bantuan tidak muncul dari kekosongan, melainkan berasal dari jalinan relasi yang secara intrinsik mengikat individu satu sama lain. Dalam kata lain, komunitas itu sendirilah yang berfungsi sebagai jaring pengaman utama, di mana kelompok-kelompok seperti keluarga, arisan, atau organisasi keagamaan menjadi infrastruktur alternatif yang esensial dalam menghadapi berbagai kerentanan. Lebih dari sekadar fungsi pragmatis, sistem yang ada dalam jaminan sosial tradisional ini dijiwai oleh ekonomi moral yang menanamkan norma timbal balik dan kewajiban untuk saling membantu, hal ini menjadikannya sebagai sebuah manifestasi dari nilai-nilai kolektif yang diinternalisasi. Yang menjadi tak kalah penting dari itu, keberadaan kesejahteraan relasional menunjukkan bahwa manfaat dari jaminan sosial tradisional ini tidak hanya sebatas tentang dukungan fisik atau finansial saja,

tetapi juga tentang mencakup rasa aman emosional, empati, dan kepedulian yang mendalam antar anggota komunitas. Demikian juga pernyataan dari Mumtaz et al, (2024) yang secara keseluruhan mempertegas bahwa ketahanan sosial dalam masyarakat tradisional sangat bergantung pada kekuatan ikatan sosial, dan nilai-nilai etis, serta dukungan emosional yang terjalin erat dalam kehidupan sehari-hari.

d. Perbedaan Jaminan Sosial Formal dan Jaminan Sosial Tradisional

Rizal (2018) juga mengungkapkan bahwa secara sederhana ketika membandingkan jaminan sosial tradisional dengan sistem formalnya, terlihat adanya sejumlah keunggulan dan keterbatasan, hal ini wajar didapatkan dalam berbagai macam produk kebijakan formal-tradisional kebanyakan. Seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Kelebihan dan Kekurangan
Jaminan Sosial Formal & Tradisional

Faktor Pembeda	Formal	Tradisional
Payung Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial • UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Norma/ Nilai yang berlaku di masyarakat

Faktor Pembeda	Formal	Tradisional
Sumber Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) • Iuran Wajib Peserta • Iuran Pemberian Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota masyarakat
Besaran Iuran	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sukarela
Jenis Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Administratif 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Sosial
Sifat Kepesertaan	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib 	<ul style="list-style-type: none"> • Sukarela
Penyelenggaraan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunitas Profesi • Kelompok Masyarakat • Perorangan

(Sumber: Undang-Undang No. 40 Tahun 2004; Undang-Undang No. 40 Tahun 2011; Data Primer)

Apabila diperhatikan lebih mendalam, maka jaminan sosial formal jauh lebih unggul dalam memberikan perlindungan pada risiko-risiko yang dihadapi

oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan jaminan sosial tradisional. Hal ini dikarenakan jaminan sosial formal menawarkan kepastian manfaat yang sudah diperhitungkan dengan matang sesuai standar kebutuhan hidup sejahtera berbeda dengan jaminan sosial tradisional, yang besaran manfaatnya tergantung dari jumlah iuran yang terkumpul. Selain itu, juga dilihat dari payung hukum. Keberlangsungan program jaminan sosial formal telah terjamin secara hukum karena dilindungi oleh undang-undang yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dibandingkan dengan jaminan sosial tradisional yang hanya berpedoman pada norma atau nilai sosial yang sifatnya mudah berubah sesuai dengan kesepakatan masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan saat sudah tidak ada lagi kesepahaman antara masyarakat program jaminan sosial tradisional tersebut akan terhenti.

Anggraini (2013) juga menyampaikan perbedaan antara jaminan sosial formal dengan jaminan sosial tradisional sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Perbedaan Jaminan Sosial Formal & Tradisional

Aspek	Jaminan Sosial Wajib	Jaminan Sosial Berbasis Masyarakat (Tradisional)
<i>Potensi Untuk Cakupan Populasi</i>		
Kemampuan untuk mengcover	Memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk mengcover pegawai negeri dan pekerja formal tingkat tertentu	Potensi ekonomi terkuat untuk pekerja ekonomi informal dengan karakteristik tertentu (pekerja atau wilayah kerja misalnya pekerja dalam sektor pertanian)
<i>Aspek finansial dan ruang lingkup manfaat</i>		
Tingkat kontribusi	Relatif tinggi dan dibagi antara pengusaha dan karyawan, sering tidak terjangkau untuk ekonomi informal dan pekerja swasta	Biasanya terjangkau untuk semua anggota dari skema
Lingkup manfaat	Komprehensif dan paket manfaat diatas standar	Ruang lingkup dan tingkat terbatas, namun adaptif dengan kebutuhan target populasi

Aspek	Jaminan Sosial Wajib	Jaminan Sosial Berbasis Masyarakat (Tradisional)
Pendistribusian kembali	Kontribusi sesuai dengan kemampuan membayar	Kontribusi rata-rata (tidak ada pendistribusian kembali)
Resiko dan konsolidasi finansial	Besar dengan penggolongan aliran kontribusi pendapatan yang reatif tetap	Kecil dan bervariasi (keanggotaan sukarela). Sulit untuk memprediksi pendapatan
<i>Pelaksanaan/ Administrasi</i>		
Pengelolaan	Komputerisasi dan proses manajemen canggih dan staff yang terlatih	Rendahnya tingkat pelatihan manajemen dan sistem tingkat kecanggihan komputerisasi
Prosedur administrasi	Standar tinggi dan kontribusi pembayaran wajib. Kesulitan untuk beradaptasi dengan kelompok non standar	Fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kelompok sasaran. Biaya transaksi biasanya lebih rendah dan sistem ini memiliki kapasitas tinggi mendeteksi dan mencegah segala bentuk penipuan atau aktivitas merugikan lainnya.

Aspek	Jaminan Sosial Wajib	Jaminan Sosial Berbasis Masyarakat (Tradisional)
<i>Tata Kelola</i>		
Alam partisipatif	Mempresentasikan perusahaan dan pekerja dalam pembuatan keputusan terpusat	Partisipasi langsung dari anggota dalam desentralisasi pengambilan keputusan
<i>Penyediaan jasa pelayanan kesehatan</i>		
Persetujuan	Kekuasaan pasar yang tinggi dan kapasitas kontrak perjanjian pada tingkat nasional/ lingkup regional	Persetujuan kekuasaan dan perjanjian di tingkat lokal
<i>Perencanaan Kebijakan</i>		
Advokasi	Pendekatan kebijakan bersifat <i>top down</i>	<i>Bottom up</i> dengan/ tanpa dukungan kebijakan

(Sumber Tesis. Angraini. 2013)

Tabel di atas, menggaris bawahi bahwa jaminan sosial dengan kepesertaan wajib dan sukarela / berbasis masyarakat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yakni jaminan sosial berbasis masyarakat memiliki potensi besar dalam mendorong partisipasi aktif anggotanya dan bersifat *bottom up* atau muncul dari masyarakat sendiri. Sedangkan jaminan sosial formal

mempresentasikan perusahaan dan pekerja dalam pembuatan keputusan terpusat, dan memiliki pendekatan yang bersifat *top down*.

Gambaran akan jaminan sosial diatas, dapat dengan mudah dipahami bahwa inti dari jaminan sosial tradisional merupakan salah satu dari bentuk dari Jaminan Sosial yang merupakan salah satu bentuk perlindungan mandiri masyarakat atas tidak meratanya jaminan sosial formal. Jaminan sosial tradisional merupakan sistem saling bantu membantu antar anggota masyarakat yang sudah ada sejak dulu. Adanya jaminan sosial tradisional ini, diberikan berdasarkan adanya hubungan keluarga, tetangga, kerabat ataupun komunitas. Tujuannya untuk membantu sesama saat terdapat masyarakat yang membutuhkan seperti pada saat terdapat masyarakat yang sakit, adanya bencana alam atau pun dalam keadaan kesulitan pangan. Sistem ini biasanya dilakukan berdasarkan pada adat istiadat dan nilai nilai kekeluargaan yang kuat.

3. Persepsi

Kinichi dan Kreitner (2003: 67) dalam (Simbolon, M. (2007). Pengertian persepsi sebagai berikut: "*Perception is a cognitive process that enables us to interpret and understand our surroundings*". Setiap individu mengalami proses kognitif yang disebut persepsi, yaitu tindakan memahami informasi lingkungan melalui indera mereka. Ini mencakup apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, hayati, dan cium. Kunci untuk memahami persepsi adalah menyadari bahwa persepsi bukanlah cerminan objektif dari realitas, melainkan penafsiran pribadi yang unik terhadap suatu situasi..

Menurut (Fadjri & Silitonga, 2019) dalam (Pertiwi, A. B., Ali, H., 2022). Persepsi adalah bagaimana individu memilih, menata, dan menafsirkan informasi guna membangun pemahaman yang berarti tentang dunia yang berarti.

Istilah persepsi itu sendiri telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kosakata bahasa Inggris, yaitu "*perception*". Kata "*perception*" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*percepto*" juga "*percipio*", Singkatnya, ini adalah mekanisme pengaturan, identifikasi, dan interpretasi informasi yang ditangkap panca indra, yang menghasilkan pemahaman individu tentang lingkungannya. Pada intinya, persepsi merupakan cara pandang seseorang yang bersifat subjektif terhadap individu atau objek. Secara lebih luas, ini mencakup penilaian seseorang terhadap sesuatu yang didasarkan pada pemahaman atau interpretasinya sendiri. (Hasanah, S. A. N., (2024)).

Menurut Walgito (2010) dalam (Nahar, A.N.), Persepsi merupakan kelanjutan dari proses penginderaan, hal ini adalah tahap ketika individu menerima rangsangan melalui indra, atau yang dikenal sebagai proses sensorik. Selain itu, persepsi juga melibatkan integrasi aktif dalam diri individu.

Dari kerangka teori yang telah dibahas, terlihat bahwa persepsi adalah cara seseorang memahami atau menilai diri sendiri, orang lain, atau kejadian, yang dibangun dari proses belajar dan pengalaman. Pandangan ini kemudian memotivasi individu untuk berinteraksi atau bertindak sesuai dengan lingkungannya, dengan tujuan dapat menghasilkan tanggapan setelah mendapatkan stimulus dan bermanfaat bagi lingkungannya.

E. Metode Penelitian

Lorens Bagus (1996) dalam Syarif, S., & Firdaus. (2013) Kata "metode" berakar dari berbagai bahasa, seperti "Method" dalam Bahasa Inggris, "Metodus" dalam Bahasa Latin, dan "Methodos" dalam Bahasa Yunani, yang semuanya merujuk pada pengertian "cara" atau "jalan yang ditempuh." Metode secara harfiah menggambarkan jalan atau cara totalitas yang ingin dicapai. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode metode merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami objek studi suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu, metode dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk mendekati, mengamati, dan menginterpretasikan fenomena berdasarkan landasan teoritis tertentu. Maka dari itu, tujuan penelitian sangat bergantung pada metode yang digunakan. Oleh karena itu, metode penelitian dalam skripsi berjudul “Tradisi Jimpitan Sebagai Jaminan Sosial Di Desa Tambakmerang Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah” yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang tradisi Jimpitan sebagai jaminan sosial di desa adalah jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif didasari oleh sifat kompleks dari isu yang diteliti, yang sulit diukur secara angka dan melibatkan dinamika interaksi sosial yang mendalam. (Putri, 2013) Berbeda dengan metode kuantitatif, penelitian kualitatif menyajikan hasil yang tidak berbasis pada perhitungan statistik atau bentuk angka lainnya. Metode kualitatif dapat dilakukan dengan dua teknik yaitu pengamatan dan wawancara dengan analisis yang non-matematis. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyingkap dan

menginterpretasikan apa yang ada di balik sebuah fenomena. Metode ini dapat memberikan rincian data yang kompleks mengenai fenomena yang valid untuk diungkapkan dan dipahami seperti yang dilakukan oleh metode kuantitatif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena atau peristiwa yang diamati, memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan sesuai dengan realitas di lapangan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini berfokus pada tradisi Jimpitan pada desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

b. Definisi Konseptual

1) Tradisi Jimpitan

Tradisi Jimpitan adalah salah satu manifestasi kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat desa di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa merupakan praktik dari pengumpulan sumbangan masyarakat berupa beras atau dana secara sukarela. Kontribusi yang terhimpun digunakan untuk beragam kepentingan sosial masyarakat, meliputi bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan, pada saat penyelenggaraan acara-acara masyarakat seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian, kegiatan-kegiatan desa, peningkatan fasilitas umum, serta respon terhadap bencana alam atau dalam keadaan kerawanan pangan.

Tradisi Jimpitan mengandung nilai-nilai luhur seperti kesukarelaan, solidaritas sosial, dan gotong royong.

2) Jaminan Sosial Tradisional

Jaminan Sosial Tradisional dapat dipahami sebagai suatu sistem dukungan yang bersifat non-pemerintah dan berbasis pada warisan budaya, di mana bantuan atau perlindungan muncul dari berbagai ikatan sosial, termasuk antara kerabat, tetangga, anggota komunitas, teman, dan dalam dinamika patron-klien dan lain sebagainya. (Tang (2005) (dalam Muchlashin, A dan Hempri S (2023)). Menurut Mumtaz (2024) Jaminan sosial tradisional bukan hanya sekadar mekanisme bantuan yang bersifat transaksional saja, melainkan fondasi kokoh yang terbangun dari adanya keterikatan sosial yang mendalam (*social embeddedness*). Bantuan tidak muncul dari kekosongan, melainkan berasal dari jalinan relasi yang secara intrinsik mengikat individu satu sama lain. Dalam kata lain, komunitas itu sendirilah yang berfungsi sebagai jaring pengaman utama, di mana kelompok-kelompok seperti keluarga, arisan, atau organisasi keagamaan menjadi infrastruktur alternatif yang esensial dalam menghadapi berbagai kerentanan. Lebih dari sekadar fungsi pragmatis, sistem yang ada dalam jaminan sosial tradisional ini dijiwai oleh ekonomi moral yang menanamkan norma timbal balik dan kewajiban untuk saling membantu, hal ini menjadikannya sebagai sebuah manifestasi dari nilai-nilai kolektif yang diinternalisasi. Yang menjadi tak kalah penting dari itu, keberadaan kesejahteraan relasional menunjukkan bahwa manfaat

dari jaminan sosial tradisional ini tentang mencakup rasa aman emosional, empati, dan kepedulian yang mendalam antar anggota komunitas.

3) Persepsi

Persepsi adalah cara seseorang untuk melihat seseorang atau sesuatu menurut pandangannya sendiri. Dalam arti luas, persepsi mencakup bagaimana seseorang memandang atau menilai sesuatu berdasarkan cara pandang atau penilaiannya sendiri. (Hasanah, S. A. N., Agustina, D., Ningsih, O., & Noprianti, I. (2024)).

c. Fokus Penelitian

Penelitian Fokus penelitian sebagai batasan ruang lingkup kajian dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian ini terletak pada pendeskripsian mendalam terhadap pernyataan atau isu pokok yang hendak dianalisis (Firman, F. 2018). Fokus penelitian tidak terikat pada format tertentu sehingga dapat disajikan dalam berbagai bentuk, bahkan seringkali, fokus penelitian dijelaskan menggunakan kalimat yang panjang dan berbelit-belit. Meskipun fokus penelitian bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan selama proses penelitian, namun harus ditetapkan sejak awal mula akan melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan fokus penelitian berfungsi sebagai kerangka acuan yang membatasi ruang lingkup penelitian, khususnya pada tahap pengumpulan data. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyaring data yang relevan dari yang tidak berkaitan dengan fokus studi. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Tradisi Jimpitan Sebagai Jaminan

Sosial Tradisional Di Desa Tambakmerang Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah” akan berfokus pada:

- 1) Tradisi Jimpitan sebagai jaminan sosial tradisional di Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mencakup tradisi Jimpitan dalam: (1) *Social Embeddedness* dalam Praktik Jaminan Sosial Tradisional, (2) Solidaritas dan Jaringan Sosial sebagai Infrastruktur Sosial Alternatif, (3) Ekonomi Moral dan Norma Timbal Balik di Komunitas Lokal, (4) kesejahteraan Relasional: Ketergantungan pada Rasa Aman dalam Hubungan Sosial.
- 2) Persepsi masyarakat tentang tradisi Jimpitan dalam konteks jaminan sosial tradisional, serta persepsi pemerintah desa terkait tradisi Jimpitan.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada area geografis tempat studi ini dilaksanakan. Penentuan tempat ini menjadi vital agar data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk penelitian ini, lokasi dipilih karena dinilai mampu merefleksikan secara akurat fenomena yang menjadi objek penelitian, serta memiliki hubungan yang kuat dengan fokus studi yang telah dirumuskan. Penelitian ini berlokasi di Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wongiri, Provinsi Jawa Tengah.

Peneliti menjadikan wilayah ini sebagai lokasi penelitian adalah karena sebagai berikut:

- 1) Lokasi penelitian merupakan wilayah yang masih mempertahankan praktik tradisi Jimpitan.
- 2) Lokasi penelitian merupakan wilayah yang sangat strategis dengan fenomena praktik tradisi Jimpitan, sehingga wilayah ini menarik dan relevan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
- 3) Pada lokasi penelitian belum ada penelitian dan tinjauan yang dilakukan mengenai tradisi Jimpitan sebagai jaminan sosial tradisional di lokasi penelitian. Hal ini mendorong ketertarikan peneliti untuk melakukan studi yang lebih mendalam di lokasi ini.

Lebih khusus peneliti memilih lokasi pengambilan sampel di dusun Tadahan dan di dusun Gondanglegi. Alasan peneliti memilih dua dusun tersebut adalah:

- 1) Dusun Tadahan dan di dusun Gondanglegi dipilih karena adanya variasi pelaksanaan tradisi Jimpitan di setiap dusun pelaksana tradisi Jimpitan.
- 2) Pemilihan Dusun Tadahan dan dusun Gondanglegi didasarkan pada potensi kedua lokasi untuk menghasilkan data yang kaya dan memungkinkan untuk analisis yang lebih mendalam. Diperkirakan dua lokasi ini akan memberikan informasi, sudut pandang dan dinamika interaksi yang krusial dalam menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai contoh, satu dusun memiliki sejarah tradisi Jimpitan yang lebih

panjang, struktur sosial yang mempengaruhi pelaksanaan, dan lain sebagainya.

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi informan-informan penting sebagai subjek penelitian, mengingat mereka adalah pihak yang menyajikan data atau informasi pokok yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Dengan demikian, subjek penelitian dalam skripsi ini adalah masyarakat desa Tambakmerang, terutama para tokoh masyarakat, guru, karang taruna dan pengurus Tradisi Jimpitan, dan pihak yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai tradisi Jimpitan di desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

Subjek penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, ini melibatkan pemilihan informan yang dianggap relevan dan memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian, sehingga dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, jumlah subjek atau informan dalam penelitian ini adalah 10 partisipan sebagai sumber data. Diantaranya terdapat 3 informan mewakili pengelola tradisi jimpitan (sampel dalam dua dusun berbeda), 3 informan mewakili *Stakeholder* yakni dari kepala desa Tambakmerang dan perangkat desa Tambak merang, 4 informan mewakili masyarakat desa Tambakmerang.

Peneliti mengklasifikasikan informan ke dalam tiga kategori untuk memfasilitasi analisis antara lain: 1) informan utama, yang didefinisikan sebagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan fenomena, interaksi, serta

hubungan yang sedang menjadi fokus penelitian, 2) informan kunci, yaitu informan yang memiliki pemahaman mendalam terkait topik yang diteliti, 3) Untuk memperkaya data, penelitian ini turut menggunakan informan tambahan, yaitu individu yang memberikan informasi relevan meskipun tidak terlibat secara langsung dalam dinamika sosial yang diamati.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan beragam cara atau metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu dengan:

a. Observasi

Syarif dan Firdaus (2013) mendefinisikan observasi sebagai kegiatan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang terlihat pada objek penelitian, baik secara bebas maupun dengan struktur tertentu. Melalui proses observasi, dapat memperoleh data seperti tempat, pelaku, objek pengamatan, perilaku, waktu kejadian, dan fenomena yang terjadi serta lain-lainnya. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, sehingga informasi yang didapatkan memiliki sifat empiris. Dari data hasil observasi ini, sangat berguna sebagai bahan dalam merumuskan fokus penelitian yang lebih spesifik dan dalam penyusunan pedoman wawancara yang relevan. Tahap observasi dalam penelitian ini telah berjalan sejak tanggal 17 Februari 2025.

Saat melakukan observasi, peneliti memulai proses pengumpulan data mulai dari pengamatan, mendengarkan secara seksama, dan pencatatan segala informasi awal yang berkaitan dengan tradisi jimpitan di desa

Tambakmerang. Observasi awal dilakukan di dusun Tadahan desa Tambakmerang sebagai sampel awal dusun pelaksana tradisi Jimpitan. Kemudian, peneliti diberikan rekomendasi untuk melakukan tinjauan ke beberapa dusun lain yang telah melaksanakan tradisi Jimpitan lebih dulu, yakni ke dusun Gondanglegi. Lalu, peneliti juga melakukan observasi langsung di kantor desa Tambakmerang untuk mendapatkan data awal untuk selanjutnya berfungsi sebagai landasan untuk menentukan fokus penelitian.

Di samping itu, pengamatan langsung selama proses wawancara turut dilakukan guna memperoleh detail pelengkap. Langkah tersebut dilakukan peneliti agar dapat menambah pemahaman mengenai keadaan informan pada saat proses wawancara berlangsung. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti juga terlibat aktif dalam pelaksanaan tradisi Jimpitan, mulai dari saat pengumpulan sumbangan masyarakat dan juga pada saat penyaluran sumbangan masyarakat tersebut. Di bawah ini rincian waktu dan lokasi observasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Tempat dan Tanggal Observasi

No.	Tanggal	Tempat Obsrvasi
1	17 Februari 2025	Rumah pengurus (Bendahara) tradisi Jimpitan
2	18 Februari 2025 s/d 10 Maret 2025	Desa Tambakmerang
3	24 Februari 2025	Rumah Kepala Dusun Tadahan, Desa Tambakmerang,

No.	Tanggal	Tempat Obsrvasi
4	03 Maret 2025	Kantor Desa Tambakmerang

(Sumber: Olah Data Peneliti, 2025)

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik fundamental yang diterapkan dalam proses pengumpulan data (Phares, 1992 dalam Fadhallah, R. A. (2021). Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau informasi yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber. Pada porses ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada narasumber agar dapat dijawab secara mendalam dan lebih rinci sesuai dengan pengalaman dan perspektif narasumber. Tujuan utama dari teknik pengambilan data ini adalah untuk menggali informasi tentang topik tertentu, sehingga peneliti dapat memahami lebih baik tentang pikiran, perasaan, motivasi dan pengalaman langsung dari narasumber serta fenomena sosial yang sedang diteliti.

Proses wawancara dalam penelitian ini menerapkan dua pendekatan berbeda. Untuk berinteraksi dengan *stakeholder* seperti kepala desa maupun kepala dusun dan pengurus tradisi Jimpitan penting bagi peneliti untuk memperoleh surat izin sebelum memulai aktivitas pengumpulan data. Setelah izin tersebut keluar, data akan dikumpulkan mengikuti rencana waktu yang telah disepakati bersama lembaga terkait. Kedua, untuk mewawancarai masyarakat desa dan informan tambahan, peneliti mengatur jadwal wawancara yang disesuaikan dengan ketersediaan informan.

Pendekatan ini dilakukan peneliti untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi informan selama proses wawancara.

Pendekatan peneliti dalam melaksanakan wawancara dengan pengurus tradisi jimpitan dan juga masyarakat desa adalah dengan menggunakan teknik *home visit*. Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti mengunjungi rumah informan. Untuk mengawali penelitian, peneliti membuka dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti serta meminta izin kepada informan atas wawancara yang akan dilakukan. Memasuki tahapan wawancara, peneliti melakukan wawancara berkisar dalam waktu 60 sampai 120 menit. Pertanyaan pertama yang diberikan adalah informan diminta untuk memberikan persepsi terhadap tradisi Jimpitan dan cakupan tradisi Jimpitan. Pertanyaan ini telah disusun lebih awal oleh peneliti untuk membangun suasana nyaman dan mempermudah dalam pengambilan data dari informan. Proses wawancara ini dilaksanakan pada 17 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025. Adapun daftar wawancara yang dilakukan peneliti, antara lain: *terlampir*

c. Dokumentasi

Menganalisis dokumen, arsip, atau materi tertulis lainnya yang relevan dengan fenomena yang diteliti merupakan metode yang esensial dalam pengumpulan data. Penelitian ini memanfaatkan beragam materi tertulis, seperti laporan, catatan pribadi, surat-menyurat, buku, dan dokumen lain. Melalui analisis terhadap bahan-bahan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai latar belakang sejarah, kebijakan yang

berlaku, serta kejadian dan tren relevan yang membentuk fenomena yang diteliti. (Creswell, 2014 dalam Jailani, M. S. 2023).

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan menghimpun materi yang berisi keterkaitan erat dengan topik yang diteliti, seperti peneliti mendapatkan materi dokumentasi dari aparat desa dan instansi terkait. Bahan-bahan ini bervariasi mulai dari buku profil, data tentang penyelenggaraan Jimpitan, hingga dasar hukum, serta berbagai referensi tertulis seperti jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan bukulain dari pelaksana tradisi Jimpitan. Peneliti memastikan bahwa seluruh data dokumentasi yang digunakan telah mendapat izin dari pihak terkait. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan objektivitas penelitian dan memperkaya data di Bab II, yaitu kondisi lingkungan dan sosial wilayah.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah sebuah strategi penelitian yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan dan analisis data untuk memeriksa temuan dari beragam perspektif. Tujuan utamanya adalah meminimalkan potensi bias selama proses penelitian guna memastikan keabsahan data yang terkumpul. (Rahardjo, M. 2010). Pada penelitian ini, peneliti mengaplikasikan triangulasi data melalui dua pendekatan berbeda, yaitu diantaranya:

1) Triangulasi Metode

Peneliti mengaplikasikan triangulasi data mengkroscek data yang terkumpul dari wawancara serta hasil observasi di lapangan. Peneliti

melakukan pengecekan silang, membandingkan keterangan dari narasumber dengan temuan observasi. Untuk memperkaya dan menguji kebenaran informasi, peneliti juga melibatkan beberapa informan guna mendapatkan gambaran utuh dari beragam perspektif. Dan terdapat keselarasan dalam proses triangulasi metode ini sehingga memperkuat kebenaran temuan di lapangan. Melalui berbagai perspektif inilah yang menjadi harapan diperolehnya hasil yang mendekati kebenaran.

2) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data merupakan pendekatan krusial dalam penelitian untuk memastikan kebenaran informasi. Caranya adalah dengan membandingkan temuan dari wawancara dan observasi dengan data yang berasal dari dokumen seperti catatan, arsip, atau buku, sehingga kebenaran informasi dari informan dapat diverifikasi secara komprehensif. Pendekatan ini menjamin diperolehnya berbagai perspektif atas topik penelitian, yang pada gilirannya akan memperkaya pemahaman dan menghasilkan temuan yang akurat pada kesimpulan yang lebih tepat. Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan dengan berbagai latar belakang yang berbeda, tentunya dengan berbagai sudut pandang yang berbeda peneliti mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan seimbang. Adanya informan yang memberikan informasi yang konsisten, hal ini yang akan memperkuat temuan peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penting berfungsi mengubah data yang terkumpul menjadi informasi berharga guna menjawab rumusan masalah. (Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018)). Untuk memahami temuan penelitian, peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara diatur dan dikaji secara rinci dan bertahap. Proses ini melibatkan pengelompokan informasi ke dalam kategori yang lebih mudah diatur, kemudian menyaring data yang relevan dengan tujuan penelitian. Ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang jelas, sehingga hasil temuan dapat dengan mudah dimengerti baik oleh peneliti maupun pembaca. Adapun, teknik analisis data yang digunakan melalui berbagai cara, yakni:

a. Reduksi Data

Sebagai sebuah proses, reduksi data mengambil kumpulan data awal yang rumit dan melampaui ukurannya, lalu memadatkan serta menyaringnya menjadi suatu informasi yang lebih terfokus dan lebih relevan dengan tujuan penelitian. Pada proses reduksi data ini peneliti melibatkan pemilihan data yang penting, mengidentifikasi dan mengelompokkan elemen-elemen yang memiliki kemiripan sifat, dilengkapi dengan representasi yang terang. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses pengumpulan dan pengambilan ulang data bagi peneliti.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan

melalui berbagai bentuk seperti tabel, grafik, transkrip wawancara, ataupun narasi teks. Maka dengan melakukan penyajian data, peneliti dapat memperoleh pemahaman terhadap data dan dapat merencanakan tahap analisis selanjutnya secara efektif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah temuan baru yang belum pernah dilaporkan dalam penelitian sebelumnya. Temuan ini memberikan deskripsi yang lebih rinci mengenai fenomena yang bersifat multi-interpretasi, sehingga memungkinkan setelah diteliti fenomena tersebut menjadi lebih jelas.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Desa

Menurut cerita, Desa Tambakmerang berasal dari kata “*tambak*” yang artinya lahan yang luas berpetak petak sawah, dan dari kata “*merang*” yang artinya kulit padi (*Gabah*). Sebab pada zaman dahulu, di Desa tersebut sangat kekurangan makan karena jarang yang mempunyai tanaman padi, ada masyarakat yang tidak mampu (tidak punya apa-apa) hanya memiliki lahan sawah, suatu saat warga tersebut mencari pinjaman bibit padi kepada orang lain yang mempunyai cadangan tandon makan (Padi), namun pada waktu itu tidak diberi bibit padi tetapi hanya diberi *merang* dengan kepercayaan dan yakin *merang* tersebut jika disebar (Tabur) pada lahan/ Tambak sehingga bisa tumbuh tanaman Padi yang sangat Subur dan akhirnya memberikan hasil yang melimpah, tidak kekurangan makan sampai saat ini. Terakhir Kepala Desa Tambakmerang diangkat dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 856 tahun 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Tambakmerang.

Jauh sebelum Desa Tambakmerang menjadi sebuah Desa pada tahun 1936, Desa Tambakmerang sebelum tahun 1936 terdiri dari 2 Desa antara lain: 1. Desa Gondanglegi dengan wilayah Dusun: Kaligading, Gondanglegi, Selokerto dan Tadahan. 2. Desa Tambakduwur dengan wilayah Dusun: Tambakduwur, Tambakmerang dan Geneng. Kemudian sejak tahun 1936, 2 hasil penggabungan beberapa desa tersebut adalah terbentuknya Desa Tambakmerang seperti sekarang ini.

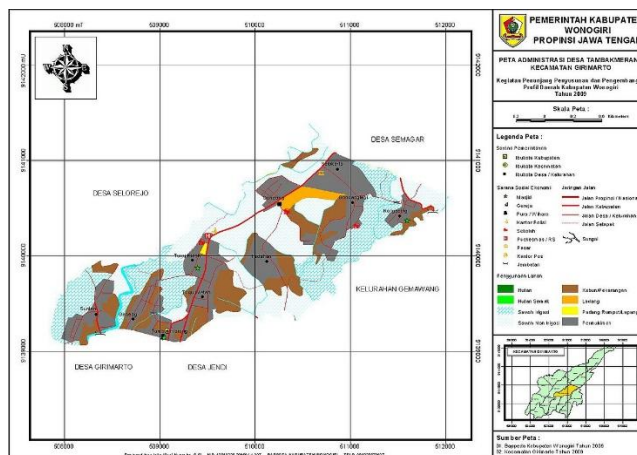
B. Kondisi Geografis

1. Letak dan Luas Wilayah

Terletak 25 km di sebelah timur ibu kota Kabupaten Wonogiri, Desa Tambakmerang merupakan bagian dari Kecamatan Girimarto. Dengan detail batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan desa Semagar
- Sebelah Timur, berbatasan dengan desa Gemawang, Mangunharjo
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan desa Jendi
- Sebelah Barat, berbatasan dengan desa Selorejo

Gambar 2. 1 Peta Desa Tambakmerang



(Sumber: Berkas:Desa tambakmerang.jpg)

Luas wilayah Desa Tambakmerang adalah 345,94 ha atau 3,4594 km persegi (km²) yang dominan terdiri dari persawahan dan perkebunan, potensi utama desa terletak pada sektor pertanian. Oleh karena itu, mayoritas penduduk desa menopang hidup sebagai petani atau pekebun. Letak Desa Tambakmerang sangat strategis karena berada di jalan provinsi penghubung antara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri serta jalan utama menuju Kabupaten

Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Prospek pertumbuhan pesat di ranah perdagangan sangat menjanjikan, sebuah fakta yang diperkuat oleh prevalensi penduduk yang berdagang sebagai sumber penghasilan utama.

2. Topografi dan Jenis Tanah

Desa Tambakmerang dicirikan oleh topografinya dengan rentang suhu rata-rata antara 28°C dan 31°C. Suhu bisa naik hingga maksimum 34°C pada musim kemarau, dan turun ke minimum 26°C sekitar musim hujan. Desa Tambakmerang, yang terletak di dataran rendah, didominasi oleh lahan persawahan. Wilayah ini menerima curah hujan rata-rata sekitar 2.000 hingga 3.000 mm setiap tahunnya, terutama saat musim penghujan. Kondisi yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa Desa Tambakmerang dapat digambarkan sebagai:

- Daerah Pertanian
- Daerah Perdagangan
- Daerah Transportasi

3. Iklim

Berada di wilayah tropis, Desa Tambakmerang mengalami musim hujan antara Oktober dan April, diikuti oleh musim kemarau yang terjadi dari Mei sampai September setiap tahunnya.

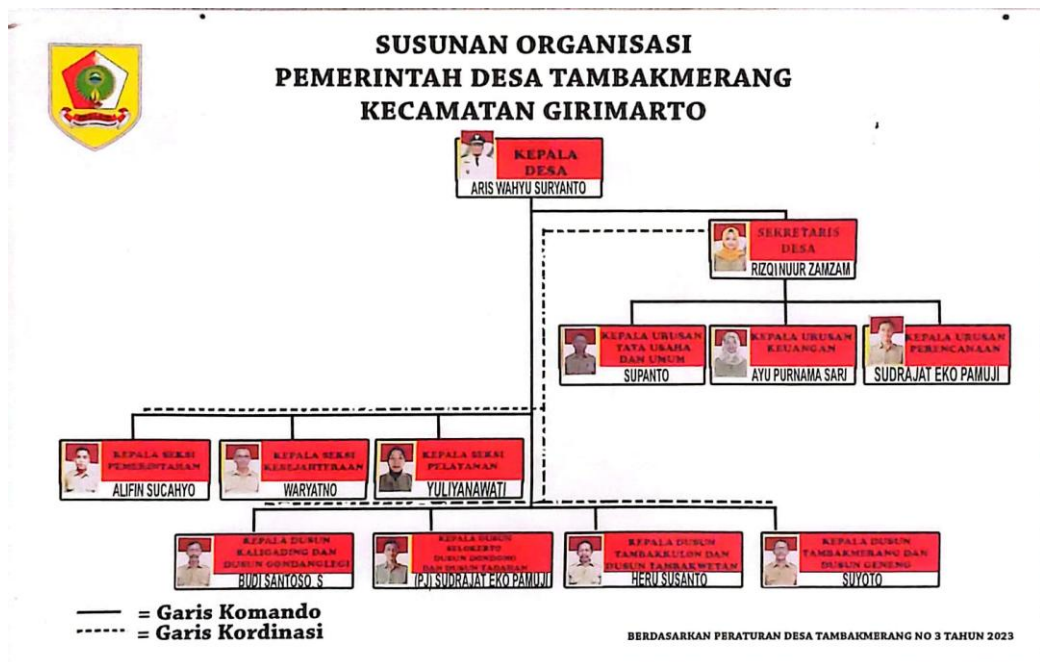
C. Keadaan Umum Desa Tambakmerang

Secara umum, keadaan Desa Tambakmerang diberikan untuk memberikan gambaran mengenai struktur pemerintahan Desa Tambakmerang, keadaan sosial, serta keadaan ekonomi. Berikut penjabaran keadaan umum Desa Tambakmerang:

1. Keadaan Pemerintahan

Struktur pemerintahan Desa Tambakmerang, berdasarkan peraturan Desa Tambakmerang No. 3 tahun 2023 dapat dilihat dari pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Tambakmerang



(Sumber: Sistem Informasi Desa Tambakmerang)

Kepala Desa Tambakmerang dipimpin oleh Aris Wahyu Supriyanto yang dibantu oleh sekretaris Desa bernama Rizqi Nuur Zamzam, kaur tata usaha dan umum bernama Supanto, kaur keuangan bernama Ayu Purnama Sari, kepala urusan perencanaan bernama Sudrajat Eko Pamuji, S.Pd. Adapun kasi pemerintahan bernama Alifin Sucahyo, kasi kesejahteraan bernama Waryatno, dan kasi pelayanan bernama Yuliyana Wati, S.P. serta terdapat sembilan Kepala Dusun dibawahnya. Di Desa Tambakmerang terdapat 9 RW dan 19 RT, dalam struktur pemerintahan desa setiap RT memiliki tanggungjawab kepada ketua RW, dan selanjutnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

D. Keadaan Demografis

Potret demografi mencerminkan kondisi populasi, baik dari segi pertumbuhan maupun penyebarannya. Dalam konteks ini, besarnya populasi adalah aset utama yang kuat untuk pembangunan yang berkesinambungan. Kuantitas penduduk yang melimpah dan berkualitas, disertai laju pertumbuhan yang teratur, akan menjadi pilar dasar dalam merealisasikan target pembangunan.

1. Jumlah Penduduk

Data administrasi pemerintah desa menunjukkan bahwa pada tahun 2023, total 3.880 penduduk terdaftar, yang tersebar di sembilan Rukun Warga (RW). Dari angka tersebut, 1.942 jiwa adalah laki-laki, sementara 1.938 jiwa adalah perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Tahun 2023

RW	KK	KK (laki-laki)	KK (perempuan)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
01	74	64	10	99	105
02	146	128	18	211	224
03	63	52	11	104	105
04	134	106	28	187	192
05	141	117	24	190	187
06	148	115	33	215	203
07	178	142	36	257	243
08	175	128	47	236	225

RW	KK	KK (laki-laki)	KK (perempuan)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
09	317	253	64	443	454
Jumlah	1376	1105	271	1942	1938

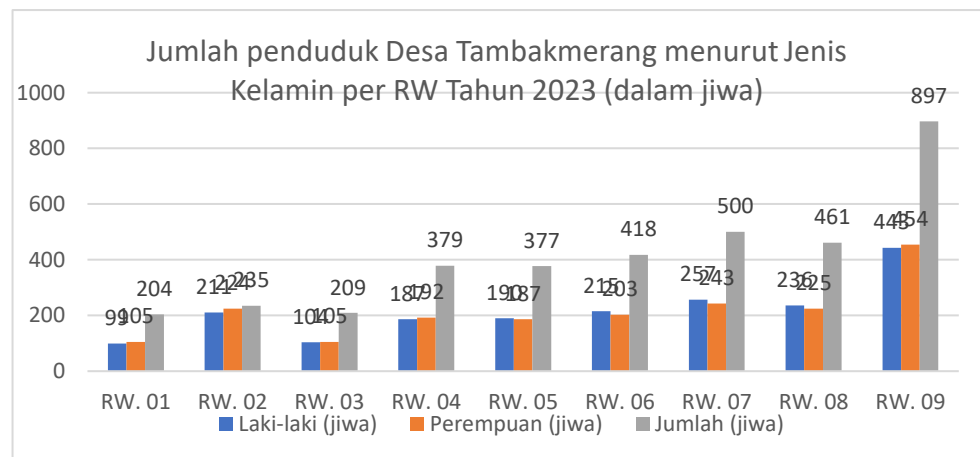
(Sumber: Sistem Informasi Desa Tambakmerang)

a. Jumlah penduduk menurut wilayah dan gender

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Untuk merancang kebijakan yang berperspektif gender secara efektif, pemahaman mendalam tentang distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin sangatlah krusial. Kebijakan yang dibuat untuk populasi dengan proporsi perempuan dan laki-laki yang seimbang tentu perlu berbeda dengan kebijakan yang ditujukan pada populasi di mana salah satu jenis kelamin lebih dominan. Dengan pendekatan yang disesuaikan ini, hasil kebijakan akan jauh lebih efektif.

Berikut jumlah penduduk Desa Tambakmerang menurut jenis kelamin per RW tercantum sebagai berikut:

Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Desa Tambakmerang Menurut Jenis Kelamin per RW Tahun 2023 (dalam jiwa)



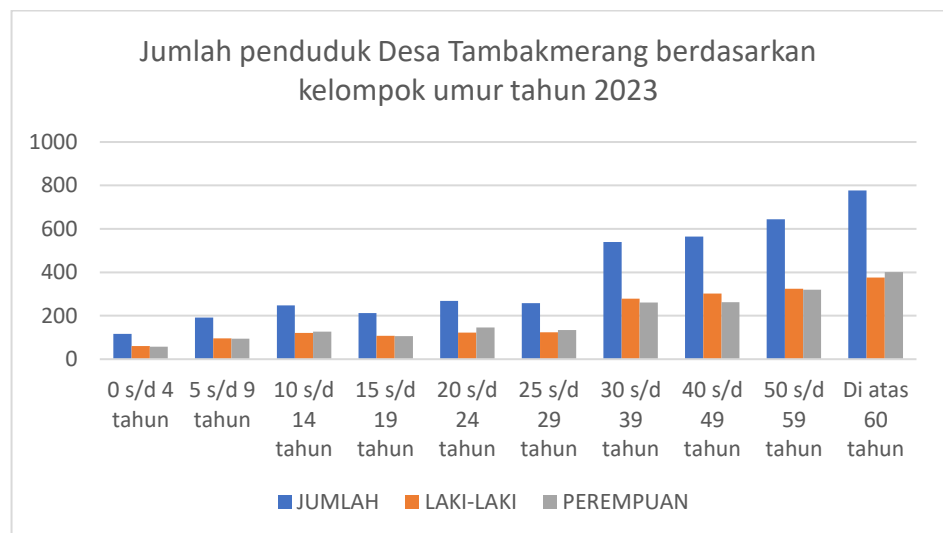
(Sumber: Sistem Informasi Desa Tambakmerang)

Dari bagan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di RW. 01 sebanyak 204 jiwa dengan dominasi penduduk perempuan yakni sebanyak 105 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 99 jiwa. Jumlah penduduk di RW. 02 sebanyak 435 dengan penduduk laki-laki 211 jiwa dan penduduk perempuan 224 jiwa, di RW. 03 penduduk laki-laki sebanyak 104 jiwa dan perempuan sebanyak 105 dengan total penduduk 209. Di RW. 04 memiliki jumlah penduduk sebanyak 379 yang terbagi antara penduduk laki-laki sejumlah 187 jiwa dan perempuan 192 jiwa. RW.05 memiliki penduduk laki-laki 190 jiwa dan penduduk perempuan 187 jiwa total 377 jiwa, lebih dari itu di RW. 06 memiliki penduduk laki-laki sejumlah 215 jiwa dan perempuan 203 jiwa. Di RW. 07 terdapat penduduk laki-laki berjumlah 257 jiwa dan perempuan sejumlah 243 jiwa dengan jumlah keduanya 500 jiwa.

Beralih ke RW. 08 memiliki penduduk laki-laki sejumlah 236 jiwa dan perempuan 225 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terbesar berada di RW. 09 yakni sejumlah 897 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 443 jiwa dan perempuan 454 jiwa. Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk laki-laki 1942 jiwa, lebih banyak dari pada penduduk perempuan sejumlah 1938 jiwa.

b. Jumlah penduduk menurut umur

Grafik 2.2 Jumlah penduduk Desa Tambakmerang berdasarkan kelompok umur tahun 2023



(Sumber: Sistem Informasi Desa Tambakmerang)

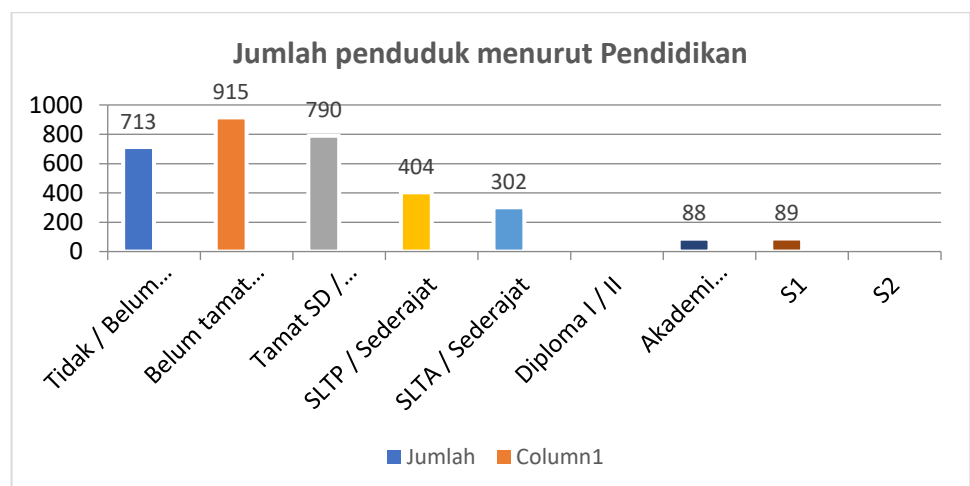
Dari bagan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur terbagi dalam sepuluh kategori terbilang dalam jiwa yakni usia 0 s/d 4 tahun sejumlah 117 dengan laki-laki 60 dan perempuan 57, usia 5 s/d 9 tahun sejumlah 191 dengan laki-laki 96 dan perempuan 95, usia 10 s/d 14 tahun sejumlah 248 dengan laki-laki 121 dan perempuan 127. Usia 15 s/d 19 tahun memiliki jumlah 213 dengan laki-laki sebanyak 107 dan perempuan

sebanyak 106, usia 20 s/d 24 tahun sejumlah 269 terdiri dari laki-laki 123 dan perempuan 146. Usia 25 s/d 29 tahun terdapat sejumlah 258 terdiri antara laki-laki 124 serta perempuan 134, usia 30 s/d 39 tahun sejumlah 540 dengan laki-laki 279 perempuan 261. Usia 40 s/d 49 tahun sejumlah 564 dengan laki-laki 302 dan perempuan 262, yang terakhir usia 50 s/d 59 tahun 644 laki-laki 324 perempuan 320 serta yang terakhir di atas usia 60 tahun memiliki jumlah terbanyak yakni 777 laki-laki 376 dan perempuan sebanyak 401.

c. Jumlah penduduk menurut Pendidikan

Data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan bisa menunjukkan sejauh mana fasilitas pendidikan telah dimanfaatkan oleh penduduk usia sekolah. Kemudian, grafik di bawah ini menyajikan data penduduk Desa Tambakmerang menurut tingkat pendidikan pada tahun 2023:

Grafik 2.3 Jumlah penduduk Desa Tambakmerang berdasarkan pendidikan tahun 2023



(Sumber: Sistem Informasi Desa Tambakmerang)

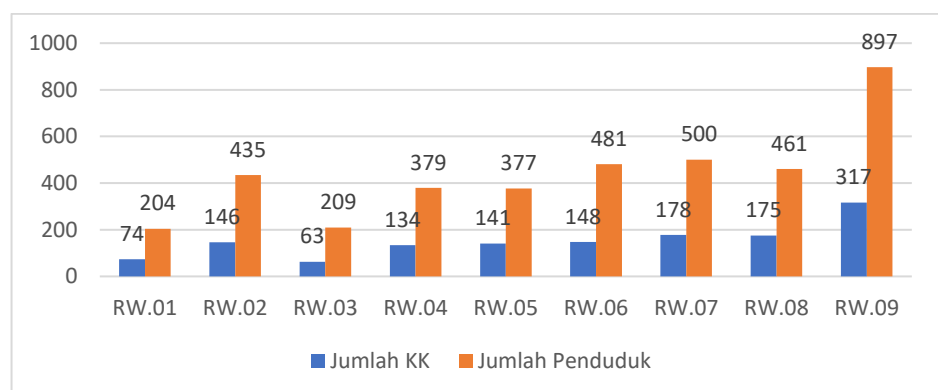
Dari grafik lingkaran diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan dalam jiwa dibagi dalam beberapa kategori, yakni: Tidak/ Belum Sekolah sebanyak 713, penduduk Belum Tamat SD/Sederajat sebanyak 915, penduduk yang Tamat SD/Sederajat sejumlah 790, penduduk yang menempuh SLTP/Sederajat 404, penduduk SLTA/Sederajat sebanyak 302, DIPLOMA /II Tidak Ada, penduduk yang mengenyam AKADEMI/ DIPLOMA III/S. Muda sebanyak 88, S1 sebanyak 89, dan S2 sejumlah 3 jiwa.

Pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM), yang mencerminkan mutu tenaga kerja yang siap mengisi lowongan pekerjaan. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah berbanding lurus dengan tingkat pendidikan; semakin tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan penduduk, semakin baik kualitas tenaganya.

2. Jumlah Keluarga

a. Jumlah keluarga menurut wilayah

Grafik 2.4 Jumlah keluarga menurut wilayah, tahun 2023



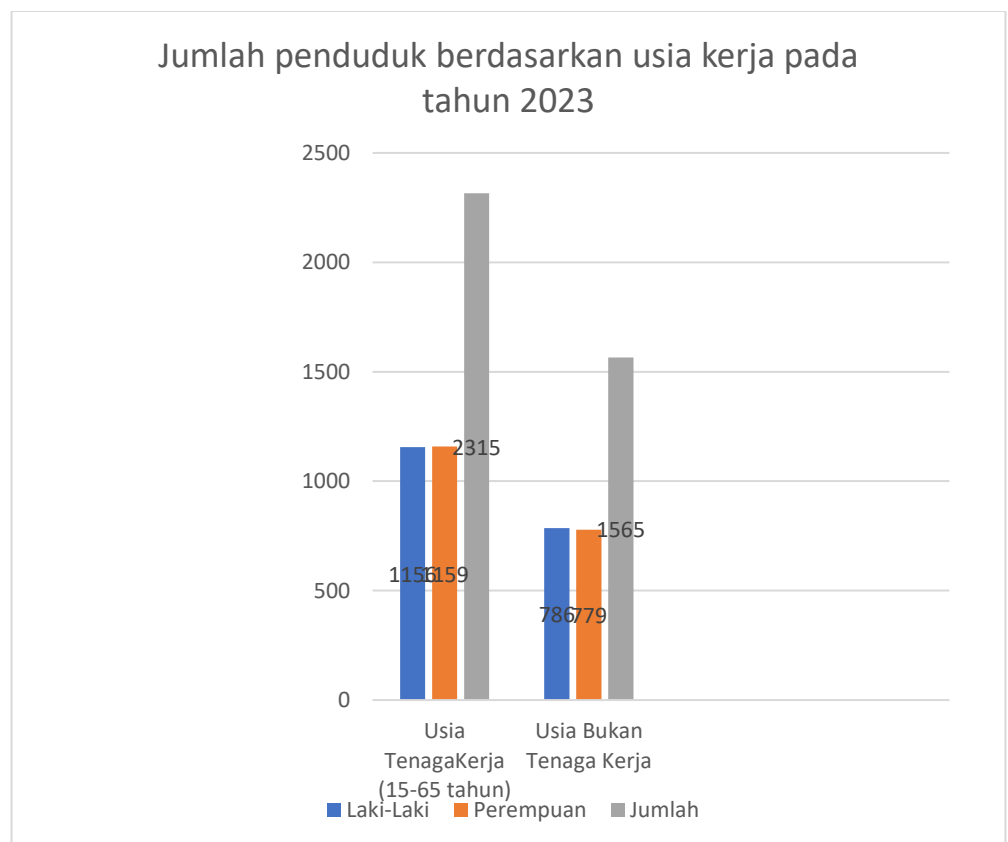
(Sumber: Sistem Informasi Desa Tambakmerang)

Dilihat dari tabel diatas jumlah keluarga yang paling banyak terdapat di RW 09 (317 KK) dan terendah terdapat di RW 01 (74 KK).

3. Angkatan Kerja

a. Jumlah penduduk usia kerja

Grafik 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kerja pada tahun 2023

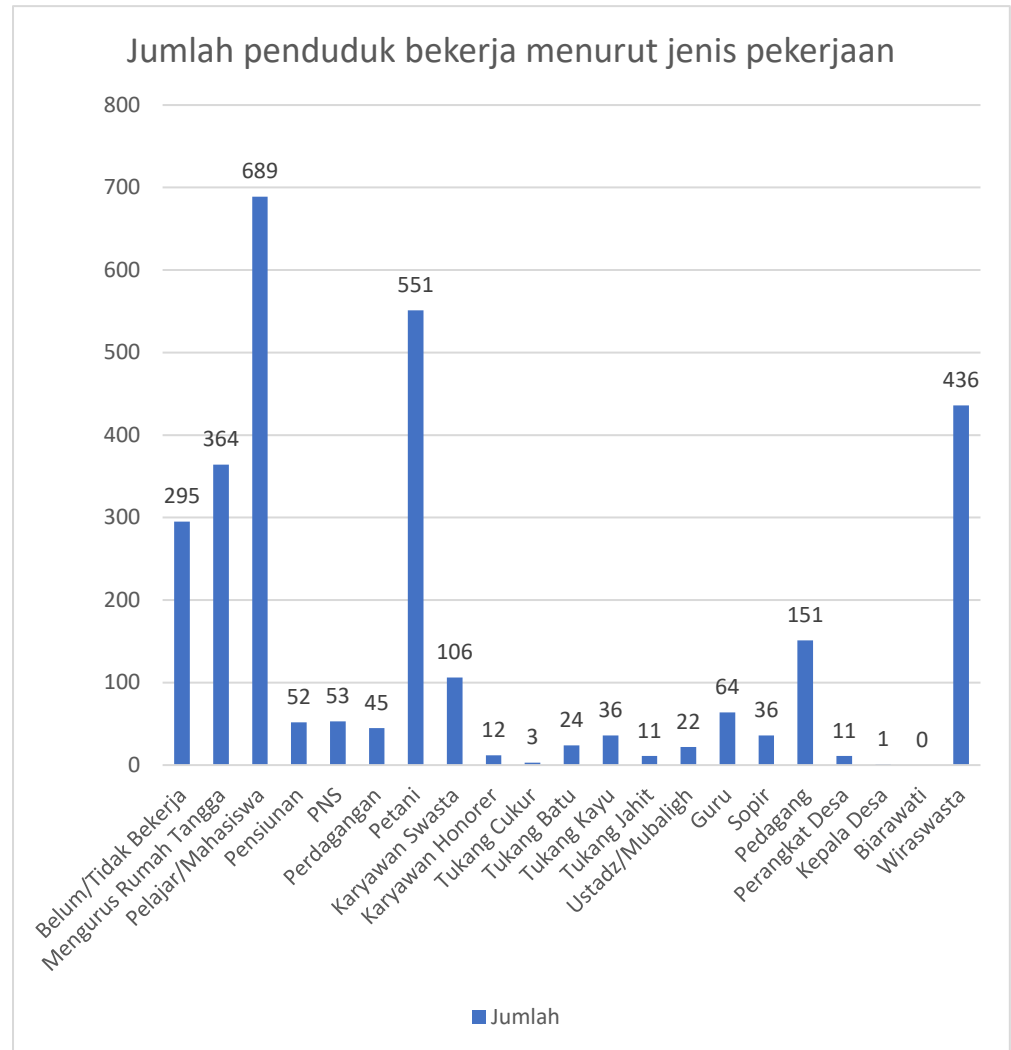


(Sumber: Sistem Informasi Desa Tambakmerang)

Di antara warga yang berada dalam rentang usia kerja, beberapa di antaranya telah terserap dalam lapangan kerja, sementara sisanya masih dalam kategori tidak bekerja atau menganggur.

b. Jumlah penduduk bekerja berdasarkan pekerjaan

Grafik 2.6 Jumlah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan



(Sumber: Sistem Informasi Desa Tambakmerang)

Data dari tabel mengindikasikan bahwa pada 2023, pelajar/mahasiswa merupakan kelompok pekerjaan terbesar di antara penduduk, dengan profesi petani/pekebun menjadi mata pencarian terbanyak.

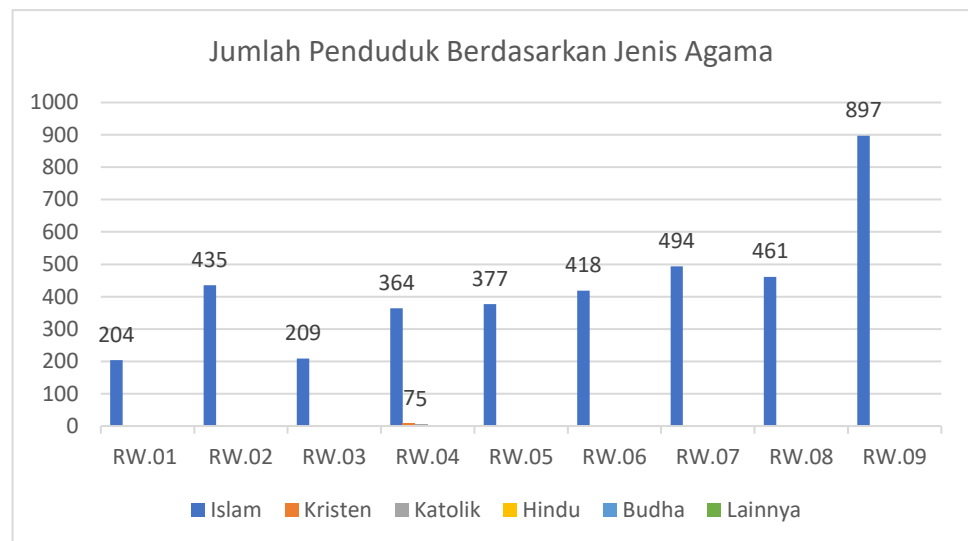
4. Keadaan Sosial

Data keadaan sosial di Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, merangkum informasi mengenai aspek agama, kesehatan, kemiskinan, dan angka pengangguran di kalangan penduduknya.

a. Agama

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Desa Tambakmerang sebesar 3880 jiwa dan mayoritas penduduk Desa Tambakmerang menganut agama islam, berikut adalah data penduduk berdasarkan agama yang dianut:

Grafik 2.7 Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Agama



(Sumber: Sistem Informasi Desa Tambakmerang)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tambakmerang menganut agama Islam yakni dengan jumlah 3.862 jiwa dan dengan 13 penduduk beragama Kristen serta 5 penduduk beragama Katolik.

Meskipun penduduk Desa Tambakmerang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda, hal ini bukan menjadi suatu permasalahan masyarakat untuk tetap hidup rukun dengan menjunjung tinggi toleransi serta saling menghormati.

b. Keadaan Kesehatan

Angka harapan hidup sering digunakan sebagai indikator untuk menilai efektivitas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum, dan khususnya dalam memajukan sektor kesehatan. Untuk mencapai angka harapan hidup yang tinggi, berbagai strategi telah diimplementasikan. Ini mencakup kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penekanan pada upaya kesehatan preventif bagi lansia, promosi olahraga teratur, dan edukasi tentang konsumsi makanan seimbang untuk kelompok usia lanjut. Selain itu, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi lansia dan balita melalui Posyandu, serta fasilitasi kegiatan Posyandu, sangat penting. Mengingat Posyandu berfungsi sebagai platform partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar, diharapkan strategi operasional untuk pemeliharaan dan perawatan dini kesejahteraan ibu dan anak dapat diterapkan secara efektif di setiap Posyandu.

Jumlah Posyandu baik Posyandu balita, Posyandu lansia maupun Posyandu remaja di Desa Tambakmerang terdiri dari 9 (sembilan), yaitu Posyandu balita 6 (enam), Posyandu lansia dan 9 (sembilan), Posyandu remaja. Selain itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan

pembinaan kesehatan dan remaja di Desa Tambakmerang terdapat kader bina keluarga balita (BKB), bina keluarga lansia (BKL), bina keluarga remaja (BKR) dan Pusat informasi dan konseling remaja (RIK-Remaja).

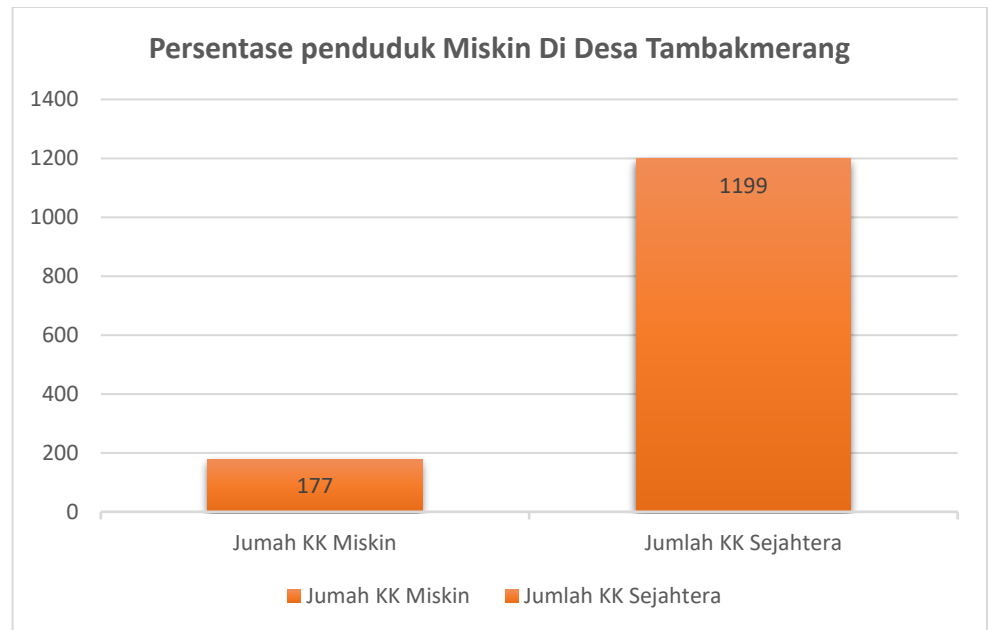
Angka kematian bayi (AKB) mengacu pada kasus meninggalnya bayi sejak lahir hingga usia tepat satu tahun. Berdasarkan data tahun 2022 dan 2023, Desa Tambakmerang tidak mencatat adanya kematian bayi. Selain itu, indikator kesehatan masyarakat yang krusial, yaitu angka kematian ibu (AKI), juga menunjukkan hasil yang positif; tidak ada kematian ibu yang tercatat di Desa Tambakmerang pada periode yang sama (2022 dan 2023).

c. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan sendiri menunjukkan persentase populasi yang tergolong miskin terhadap total jumlah penduduk. Penentuan individu miskin didasarkan pada garis kemiskinan, yaitu batas nilai rupiah pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum konsumsi pangan dan non-pangan, demi mencapai taraf hidup yang layak.

Data yang kami peroleh mengenai jumlah penduduk miskin di Desa Tambakmerang pada tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Grafik 2.8 Jumlah Penduduk Miskin Desa Tambakmerang pada tahun 2023



Sumber: Profil Desa Tambakmerang

Tingkat kemiskinan yang signifikan menjadi tantangan utama di Desa Tambakmerang. Kemiskinan ini sangat berkaitan dengan kesulitan warga memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan dan tempat tinggal yang layak. Isu tempat tinggal yang layak huni terlihat dari praktik satu rumah ditinggali oleh lebih dari satu kepala keluarga, padahal setiap individu berhak atas kesejahteraan lahir batin, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang sehat, semua itu adalah kebutuhan fundamental manusia. Berbagai upaya penanganan kemiskinan telah dilaksanakan di Desa Tambakmerang untuk mengatasi situasi ini. diantaranya melalui Program Bedah Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) dan Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD), serta berbagai kegiatan ekonomi produktif dengan harapan dapat menurunkan tingkat kemiskinan tiap tahunnya.

d. Tingkat Pengangguran

Pada tahun 2023, Desa Tambakmerang memiliki 2.688 jiwa dalam rentang usia produktif (15-65 tahun). Dari jumlah itu, 2.532 orang telah terserap dalam lapangan kerja, baik formal maupun informal. Ini berarti, angka pengangguran di desa tersebut tercatat 156 jiwa pada tahun 2023. Meski demikian, kesempatan kerja yang tersedia sebenarnya cukup banyak. Jumlah pengangguran tersebut muncul akibat beberapa permasalahan, seperti:

- a) Tidak memiliki keterampilan bekerja/ lemahnya penguasaan ketrampilan spesifik yang dibutuhkan sekitar 3%.
- b) Masih menjadi tanggungan orang tua sekitar 11%.
- c) Mahasiswa/Pelajar/Ibu Rumah Tangga sekitar 84%.
- d) Enggan bekerja sekitar 2%

Di Desa Tambakmerang, tantangan ketenagakerjaan utamanya adalah rendahnya semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat. Fenomena ini terlihat jelas, bahkan di kalangan lulusan perguruan tinggi yang lebih memilih mencari pekerjaan daripada menciptakan peluang kerja baru. Sebaliknya, lulusan SD dan SMP seringkali terpaksa menerima pekerjaan apa adanya karena keterbatasan pilihan. Untuk mengatasi pengangguran, berbagai inisiatif telah dijalankan, termasuk kolaborasi dengan pemerintah

dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta menyelenggarakan pelatihan keterampilan.

E. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Tambakmerang pada tahun 2023 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, Perkebunan, perdagangan, kerajinan dan jasa.

1. Investasi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Tambakmerang menanamkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di setiap RW. Tabel berikut menyajikan nilai investasi tersebut dari tahun 2022 hingga 2023:

Tabel 2.2 Besaran Investasi Pembangunan Pemerintah Desa Tambakmerang pada tahun 2022 sampai dengan 2023

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Persentase dari Pendapatan
1	2022	486.994.000	26,17%
2	2023	415.162.490	25,26%

(Sumber: Sistem Informasi Desa Tambakmerang)

2. Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Berikut adalah area-area yang memerlukan perhatian khusus di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sepanjang tahun 2023:1) Potensi lahan pertanian di Desa Tambakmerang 2) Potensi jumlah masyarakat yang bergantung dari sector pertanian, perikanan dan peternakan.

3. Perindustrian

Industri yang ada di Desa Tambakmerang di dominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Jenis industri yang ada di desa Tambakmerang bersifat kepemilikan pribadi. Sedang industri yang menjadi potensi yaitu: 1) Adanya kompleks pertokoan 2) Industri Makanan yang ada di tiap Dusun 3) Industri di bidang jasa yang ada di tiap Dusun.

4. Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

Desa Tambakmerang tidak lagi memiliki koperasi, sebab koperasi yang sebelumnya ada yaitu koperasi RT sudah dinonaktifkan dikarenakan tidak memiliki badan hukum. Sedangkan lembaga keuangan mikro non koperasi di Desa Tambakmerang terdapat Simpan Pinjam yang dikelola oleh Bumdes bersama, yaitu Bumdes Bersama UPK Girimarto LKD. Selain itu, terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Tambak Mulyo" di Desa Tambakmerang yang sudah berkembang dengan jenis usaha fotocopy, brilink dan loket online.

F. Keadaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa

Desa Tambakmerang telah melengkapi setiap wilayahnya dengan berbagai fasilitas publik. Ini mencakup infrastruktur untuk pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kegiatan keagamaan, serta fasilitas umum lainnya.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Desa Tambakmerang

No	Bidang	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kesehatan	Puskesmas	1
		PKD	1
		Apotek	1
		Dokter Umum	1
		Dokter Gigi	1
		Dokter Spesialis	0
		Bidan	1
		Posyandu Balita	9
		Posyandu Lansia	6
		Posyandu Remaja	9
2	Pendidikan	PAUD/Kelompok Bermain	1
		Taman Kanak-Kanak	2
		Sekolah Dasar	2
		SLTP	1
3	Keagamaan	Musholla/Langgar	14
4	Sarana & Prasarana Desa	Kantor Camat Girimarto	1
		Kantor Desa Tambakmerang	1
		Pasar Dess	1
		BUMDes	1

No	Bidang	Sarana dan Prasarana	Jumlah
		SAB	5
		Fasilitas Olahraga	3
		Perpustakaan Desa	1
		Jalan ber aspal	3
		Jalan Rabat beton	4
		Jalan berbatu/tanah	8
		Jembatan kecil	10
		Jembatan sedang/besar	1
		Jaringan Irigasi	2
		Lapangan Bola	1
		Gedung Olahraga/Gedung Serbaguna	1

(Sumber: Sistem Informasi Desa Tambakmerang)

Adanya sarana dan prasarana yang baik ini merupakan fondasi penting dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Infrastruktur jalan yang memadai akan lebih memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dalam berbagai aktivitas serta dalam pemenuhan kebutuhan.

G. Tradisi Jimpitan di Desa Tambakmerang

Tradisi Jimpitan di Desa Tambakmerang merupakan salah satu manifestasi dari kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakatnya. Upaya kolektif ini tidak hanya sekedar berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan sumber daya saja, melainkan juga sebagai perekat solidaritas masyarakat dan sarana gotong royong antar warga masyarakat desa. Pelaksanaan Jimpitan secara menyeluruh

mencakup seluruh dusun di Desa Tambakmerang. Tetapi, model pelaksanaan tradisi Jimpitan ini bersifat beragam dan disesuaikan dengan kebijakan serta kebutuhan di setiap masing-masing dusun. Keberagaman dalam implementasinya ini, menunjukkan adanya kemampuan tradisi Jimpitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial setempat.

Berdasarkan jenisnya, Desa Tambakmerang mengklasifikasikan Jimpitan ke dalam dua kategori utama, yaitu Jimpitan rutin dan Jimpitan insidental. Jimpitan rutin merupakan suatu kegiatan kolektif yang dilaksanakan secara teratur dari kurun waktu yang telah ditentukan dan juga telah disepakati bersama oleh masyarakat setempat. Besaran kontribusi atau nominal dalam Jimpitan rutin ini umumnya juga berdasarkan pada kesepakatan bersama, tentu mempertimbangkan partisipasi yang merata dan terstruktur. Berbeda dengan jimpitan rutin, jimpitan insidental diinisiasi sebagai bentuk respons terhadap situasi-situasi yang mendesak atau peristiwa tak terduga yang menimpa anggota masyarakat. Beberapa contoh pelaksanaan jimpitan insidental diantaranya seperti pengumpulan bantuan pada saat terdapat warga masyarakat yang menderita sakit, menghadapi musibah kematian ataupun pada saat kondisi genting lainnya yang memerlukan bantuan kolektif. Mekanisme ini menunjukkan adanya ruang kemanusiaan dan kepedulian sosial yang kuat dalam budaya masyarakat desa Tambakmerang.

Pelaksanaan Jimpitan di desa Tambakmerang juga memiliki perbedaan dalam struktur kelembagaan pengelolaannya. Tanggungjawab pengelolaan jimpitan di setiap dusun diserahkan pada entitas yang berbeda di setiap dusunnya, hal ini menunjukkan adanya keleluasaan dusun untuk menentukan dan mengelola tradisi

Jimpitan. Beberapa dusun mempercayakan pengelolaan Jimpitan kepada kelompok pemuda/karang taruna, yang secara aktif terlibat dalam mobilisasi dan distribusi sumber daya. Di sisi lain, terdapat dusun yang menempatkan tanggung jawab ini pada Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) dalam mengintegrasikan Jimpitan dalam kerangka administrasi kewilayahan. Juga dari Pemberdayaan Kelompok Keluarga (PKK) maupun kelompok ronda turut berperan sebagai pengelola Jimpitan, adanya keberagaman pengelola ini, menunjukkan adanya peran serta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga tradisi Jimpitan di desa Tambakmerang. Adanya keberagaman dalam pengelola ini, tentu berdampak pada orientasi dan peruntukan dana atau hasil Jimpitan sendiri.

Sebagai contoh, Jimpitan yang berada di bawah naungan kelompok pemuda/karang taruna umumnya dialokasikan untuk kepentingan yang berdimensi sosial dan pengembangan komunitas. Hal ini mencakup penyaluran bantuan sosial pada masyarakat yang membutuhkan, pembiayaan kegiatan kepemudaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kreativitas, untuk persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga dusun (pordus), dan juga diperuntukkan dalam rehabilitasi atau perbaikan fasilitas umum. Berbeda halnya dengan Jimpitan yang dikelola oleh RT/RW yang cenderung digunakan pada keperluan infrastruktur dan juga fasilitas umum seperti pembenahan sarana dan prasarana dusun, pembangunan gorong-gorong untuk sanitasi lingkungan, pembenahan lampu jalan untuk penerangan. Sementara itu, jimpitan yang dikelola oleh PKK memiliki fokus peruntukan yang lebih spesifik, yaitu untuk penguatan internal PKK, keperluan keagamaan, pembayaran honorarium pemuka agama, serta untuk pemenuhan

kebutuha lain yang sejalan dengan program kerja PKK dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga. Keragaman peruntukan ini menegaskan bahwa tradisi jimpitan bukan sekadar mekanisme pengumpulan dana saja, melainkan sebuah sistem multidimensional yang mampu menopang berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Desa Tambakmerang.

BAB III

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dari temuan data yang telah dikumpulkan peneliti dalam penelitian lapangan di Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah melalui metode observasi dokumentasi serta wawancara dengan informan, Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Analisis data ini bertujuan untuk mengelola data penelitian lapangan serta menyederhanakan data yang kompleks, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran dan juga pemahaman mendalam mengenai tradisi Jimpitan sebagai jaminan sosial di Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan jawaban dari informan sebagai acuan dan landasan dalam proses analisis data. Hal ini dikarenakan analisis data dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan peneliti sebelumnya. Maka dari itu, sebelum menganalisis data, peneliti melakukan identifikasi terhadap informan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan.

A. Deskripsi Informan

Deskripsi informan memberikan gambaran profil narasumber yang telah dipilih peneliti. Informan yang telah dipilih merupakan informan yang telah terpercaya dan memiliki pengetahuan yang relevan dengan bidang yang diteliti. Adapun data informan yang telah diidentifikasi oleh peneliti adalah:

Tabel 3.1 Deskripsi Berdasarkan Data Informan

No	Nama	L/P	Usia	Pendi- dikan	Status	Pekerjaan	Lokasi
1	Lilik Setiawan, S.Pd	L	38	S1	Belum Menikah	Guru	Tadahan
2	Sulastri, S.Pd	P	33	S1	Menikah	PNS	Tadahan
3	Sukatno	L	46	SMP	Belum Menikah	Wiraswasta	Gondanglegi
4	Aris Wahyu Supriyanto	L	42	SMA	Menikah	Kepala Desa	Tambak merang
5	Yuliyawanawati, S.P.	P	42	S1	Menikah	Kasi Desa	Gondanglegi
6	Sudrajat Eko Pamuji, S.Pd	L	28	S1	Menikah	Kaur Perencanaan Desa	Tadahan
7	Mino	L	74	SD	Menikah	Petani	Tadahan
8	Karmi	P	80	SD	Menikah	Petani	Tadahan
9	Yurina	P	30	SMP	Menikah	Wiraswasta	Gondanglegi
10	Surati	P	47	SD	Menikah	Petani	Gondanglegi

(Sumber: Data Primer (diolah 2025))

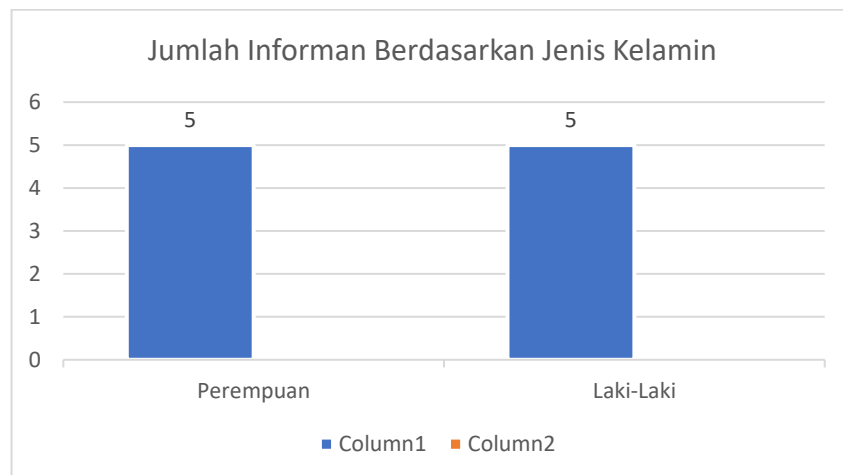
Pada tabel di atas, peneliti memilih 10 informan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Informan-informan ini dipilih secara selektif

berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan informasi penelitian serta relevansi dengan judul dan tema penelitian. Dari tabel tersebut jumlah informan dibagi dalam pengklasifikasian informan sebagai berikut:

1. Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Visualisasi karakteristik informan berdasarkan jenis kelaminnya, dari total 10 informan yang terlibat dalam penelitian ini, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.1 Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin



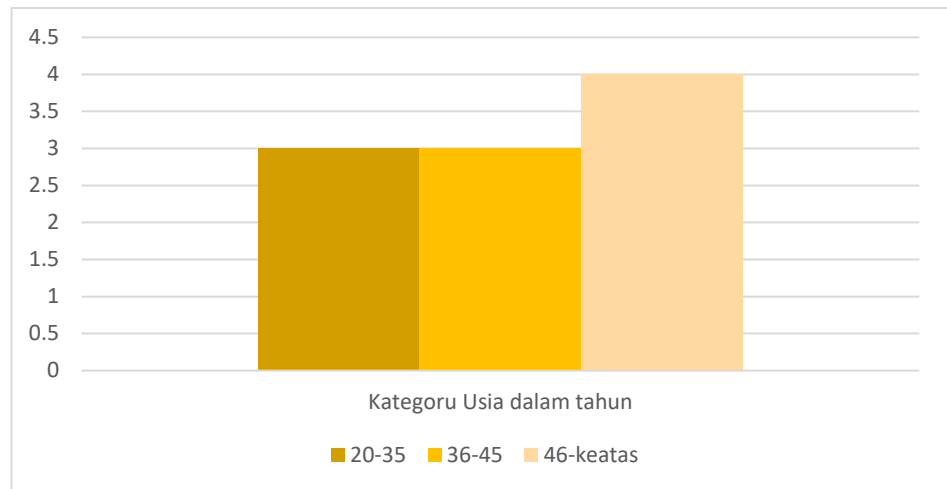
(Sumber: Data Primer (diolah 2025))

Grafik diatas menunjukkan bahwa dalam 10 informan yang terpilih, terdapat lima informan laki-laki dan lima informan perempuan.

2. Jumlah Informan Berdasarkan Umur

Setelah melakukan penelitian terhadap 10 informan, peneliti dapat mengidentifikasi karakteristik informan berdasarkan umur. Hasil identifikasi ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3. 2 Jumlah Informan Berdasarkan Umur



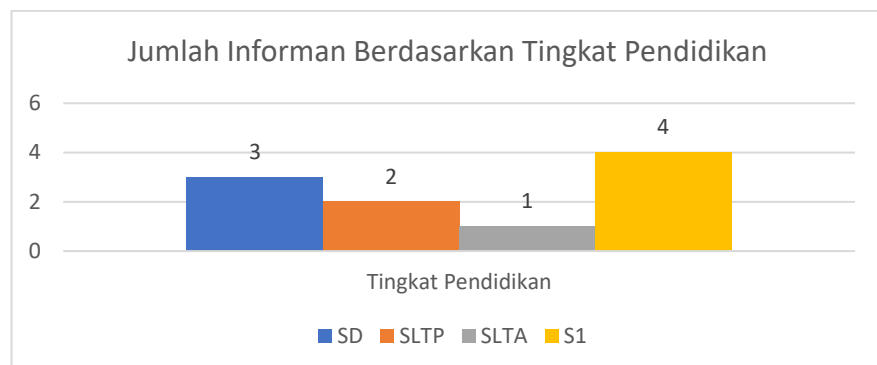
(Sumber: Data Primer (diolah 2025))

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa informan yang berusia antara 20-35 tahun berjumlah 3 Informan, usia antara 36-45 tahun berjumlah 3 Informan, dan informan berusia antara 46-keatas sebanyak 4 Informan.

3. Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penelitian yang dilakukan terhadap 10 informan didapatkan gambaran karakteristik informan berdasarkan tingkat Pendidikan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.3 Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



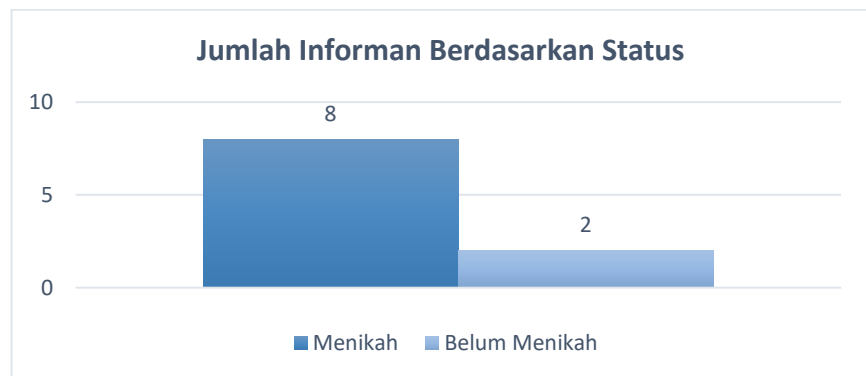
(Sumber: Data Primer (diolah 2025))

Grafik menunjukkan bahwa informan yang memiliki tingkat Pendidikan SD sejumlah tiga informan, untuk tingkat SLTP sebanyak dua informan, untuk tingkat SMA sebanyak satu informan dan sebanyak empat narasumber berpendidikan sarjana.

4. Jumlah Informan Berdasarkan Status

Penelitian yang dilakukan terhadap 10 informan didapatkan gambaran karakteristik informan berdasarkan status, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Grafik 3.4 Jumlah Informan Berdasarkan Status



(Sumber: Data Primer (diolah 2025))

Grafik menunjukkan bahwa informan yang belum menikah sebanyak dua informan, sedangkan informan yang sudah menikah lebih banyak yaitu sejumlah tujuh informan.

5. Jumlah Informan Berdasarkan Dusun

Penelitian yang dilakukan terhadap 10 informan didapatkan gambaran karakteristik informan berdasarkan dusun tempat tinggal informan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Grafik 3.5 Jumlah Informan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	Jumlah Informan
Tadahan	5
Gondanglegi	4
Kepala Desa Tambakmerang	1

(Sumber: Data Primer (diolah 2025))

Tabel diatas menunjukkan bahwa informan yang tinggal di dusun Tadahan sebanyak lima informan, sedangkan informan yang tinggal di dusun Gondanglegi sebanyak empat informan, dan terdapat satu informan kepala desa.

B. Analisis Data

Setelah peneliti melaksanakan penelitian melalui metode observasi, wawancara serta pengumpulan dokumen, tahap berikutnya adalah melakukan analisis. Tujuan dari analisis data ini tentunya untuk mengelola dan menafsirkan hasil penelitian agar mudah dipahami dan bermakna. Proses ini melibatkan penyederhanaan yang kompleks menjadi informasi yang lebih ringkas, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti. Analisis data ini kemudian memungkinkan peneliti untuk menjelaskan hasil penelitian secara jelas dan sistematis serta dapat merumuskan kesimpulan yang kuat mengenai Tradisi Jimpitan sebagai Jaminan Sosial Di Desa Tambakmerang Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

1. Tradisi Jimpitan Sebagai Jaminan Sosial Tradisional Di Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah

Tradisi Jimpitan sebagai jaminan sosial Tradisional di Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mencakup tradisi Jimpitan dalam: (1) *Social Embeddedness*" atau Ketergantungan Sosial dalam Praktik Jaminan Sosial Tradisional (2) Solidaritas dan Jaringan Sosial sebagai Infrastruktur Sosial Alternatif (3) Ekonomi Moral dan Norma Timbal Balik di Komunitas Lokal (4) Kesejahteraan Relasional: Ketergantungan pada Rasa Aman dalam Hubungan Sosial. Selain itu, juga mencakup: mekanisme atau poses pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana Jimpitan; frekuensi pelaksanaan tradisi Jimpitan; peserta yang terlibat dalam tradisi Jimpitan; perubahan sosial yang mempengaruhi tradisi Jimpitan; serta kontribusi tradisi Jimpitan dalam meningkatkan jaminan sosial di desa.

Di tengah keterbatasan jangkauan jaminan sosial formal dari pemerintah, tradisi Jimpitan hadir sebagai alternatif jaminan sosial yang berbasis pada kearifan lokal dan kemampuan masyarakat desa. Praktik ini menunjukkan kemandirian komunitas dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi secara kolektif. Tradisi Jimpitan bukan hanya sekadar praktik mengumpulkan sumbangan kecil, tetapi juga merupakan representasi nyata dari jaminan sosial tradisional di tingkat desa. Ia memperkuat hubungan sosial, menyediakan mekanisme redistribusi sederhana, dan menjadi wujud kemandirian masyarakat

dalam memberikan perlindungan bagi anggotanya, selaras dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.

a. Tradisi Jimpitan dalam konteks *Social Embeddedness*" atau Ketergantungan Sosial dalam Praktik Jaminan Sosial Tradisional

Tradisi Jimpitan, sebuah praktik kearifan lokal yang mengakar kuat di berbagai komunitas di Indonesia, merupakan contoh nyata bagaimana perlindungan sosial informal beroperasi melalui lensa keterlekatan sosial (*social embeddedness*). Dalam jimpitan, setiap rumah tangga secara sukarela menyisihkan segenggam beras atau sejumlah kecil uang setiap hari untuk dikumpulkan oleh petugas dan atau kelompok RT/RW atau pemuda serta warga lainnya. Dana atau bahan makanan yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk membantu warga yang sedang mengalami kesusahan, sakit, mengalami musibah, atau untuk keperluan bersama komunitas, seperti perbaikan fasilitas umum. Praktik tradisi Jimpitan ini secara inheren mencerminkan konsep *social embeddedness* karena partisipasi di dalamnya terdapat kewajiban sosial yang tertanam dalam jaringan hubungan antarwarga. Masyarakat berpartisipasi karena mereka merasakan adanya keterikatan dan interdependensi dengan tetangga dan komunitasnya. Bantuan yang diberikan melalui jimpitan bukanlah donasi anonim, melainkan ekspresi konkret dari solidaritas dan rasa memiliki di antara anggota komunitas. Terkait hal tersebut, di dusun Gondanglegi ditunjukkan dengan adanya pernyataan dari ibu Yuliyawati, S.P. yakni:

"La jimpitan ki iso nggo sopo wae, ges e ki kabeh iso entuk. Sik wis ndue BPJS opo sik ra ndue BPJS iso entuk. Sik gaweane tani, buruh, bakul, opo

meneh simbah-simbah sing urip dewe, kerep dadi sasaran sik melu ngisi Jimpitan karo sik entuk manfaat e.” (wawancara, 3 Maret 2025)

Pernyataan di atas secara tegas menunjukkan bahwa tradisi Jimpitan memiliki karakter inklusif universal dalam komunitasnya. Sistem ini tidak membedakan status keanggotaan formal seperti BPJS. Ini adalah inti dari *social embeddedness*: bantuan diberikan berdasarkan keterikatan dan kebutuhan dalam komunitas, bukan pada kriteria administratif atau formal. Artinya, siapa pun yang merupakan bagian dari "ges" (keluarga/lingkungan sosial) dapat menjadi penerima manfaat, karena mereka tertanam dalam jaring pengaman sosial yang disediakan oleh jimpitan. Sistem ini mengakui berbagai profesi dan kondisi hidup (petani, buruh, pedagang, lansia yang hidup sendiri) sebagai pihak yang berpotensi membutuhkan atau berkontribusi. Ini menegaskan bahwa jimpitan didasari oleh pengenalan langsung terhadap kondisi sosial ekonomi warga dalam lingkup keterlekatan mereka, bukan pada kategori kaku. Ketergantungan sosial di sini bekerja dua arah: siapa saja bisa menjadi penyumbang dan penerima, tergantung pada situasi dan kapasitas masing-masing, yang diatur oleh norma timbal balik yang tidak tertulis. Selain itu, sistem di mana rasa aman diperoleh dari keyakinan bahwa komunitas akan saling menopang, terlepas dari status formal atau kemampuan individu. Ini adalah mekanisme jaminan sosial yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, kepedulian, dan kewajiban moral yang dihayati bersama, menjadikan ikatan sosial itu sendiri sebagai aset paling berharga dalam menghadapi kerentanan. Ibu Yuliyawati, S.P. juga memberi imbuhan bahwa:

“Ngeri ki dekanu no, sakdurunge enek dana desa ki jimpitan e seket ewu, tapi tahunan. Tapi nggonaku kae swadaya kecuali PIP. Bareng enek dana desa yang wis itu. Beda-beda, jimpitan itu peruntukannya beda-beda. Jimpitan untuk infrastruktur, jimpitan nggo sosial, jimpitan kematian.” (wawancara, 3 Maret 2025)

Pernyataan narasumber diatas menggambarkan adanya perubahan dinamika dan peruntukan praktik Jimpitan dari waktu ke waktu seiring dengan adanya dana desa. Narasumber mengungkapkan bahwa sebelum adanya dana desa, praktik Jimpitan di wilayahnya memiliki nominal yang besar, yaitu sebesar lima puluh ribu rupiah dilakukan dalam kurun waktu tahunan. Selain itu, disebutkan juga bahwa pembangunan di wilayahnya juga mengandalkan swadaya masyarakat kecuali untuk program PIP (Program Indonesia Pintar). Namun, dengan adanya alokasi dana desa kemudian terjadi perubahan yang signifikan dalam praktik Jimpitan. Narasumber menekankan bahwa peruntukan jimpitan menjadi beragam dan lebih spesifik. Mulai dilalokasikan pada berbagai kebutuhan seperti kegiatan sosial, infrastruktur, dan santunan kematian. Dengan adanya hal ini, terdapat indikasi bahwa kehadiran dana desa juga mempengaruhi cara masyarakat dalam mengorganisir dan memanfaatkan praktik Jimpitan untuk berbagai keperluan yang lebih terstruktur dan terarah. Narasumber menyapaikan awal mula adanya Jimpitan sebagai berikut:

“Jimpitan di Gondanglegi wis sue banget, aku ket dadi kadus 2009 we wis enek, dadi sik mengadakan pertama kali ki aku 2009 kui. Tapi kan ora kroso, pelunasan PBB itu sakiki wis target, nggonaku sangang yuto sangag atus gek Jimpitan e wis mlumpuk sepuluh yuto limangatus, dadi PBB keluar, hari itu lunas” (wawancara, 3 Maret 2025)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa narasumber menyoroti keberlanjutan dan efektivitas praktik Jimpitan di dusunnya, Gondanglegi terkhusus dalam membantu pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Narasumber menyampaikan bahwa tradisi Jimpitan di wilayah telah berlangsung sangat lama, yakni sejak tahun 2009 ketika narasumber menjabat sebagai kepala dusun dan mulai dari situ mengorganisasikannya. Meskipun nominal Jimpitan mungkin tidak terasa besar secara individu, akumulasi dana dari praktik ini terbukti signifikan. Sebagai contoh konkret, narasumber menyebutkan juga bahwa target pelunasan PBB di wilayahnya berkisar pada angka sebesar sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah, namun dana Jimpitan yang terkumpul telah mencapai sepuluh juta lima ratus ribu rupiah. Hal ini tentu menunjukkan bahwa Jimpitan secara kolektif telah mampu melampaui target pelunasan PBB, sehingga pembayaran pajak dapat diselesaikan secara lunas pada hari yang sama. Dengan demikian, paparan dari narasumber ini menggaris bawahi peran Jimpitan sebagai mekanisme pengumpulan dana masyarakat yang telah berjalan selama 16 tahun yang ternyata efektif dan berkelanjutan, memberikan kontribusi nyata dalam membantu warga salah satunya adalah memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Sedangkan di dusun Tadahan ditunjukkan dengan adanya pernyataan dari bapak Lilik Setiawan, S.Pd. yakni:

“Mungkin saya jawabnya yang lingkup dusun Tadahan saja ya mbak, soalnya di setiap dusun di desa Tambakmerang tu pasti ada mekanismenya sendiri. Tradisi Jimpitan ini kalau dilihat dari kami sebagai pengurus atau karangtaruna itu bukan sekedar kebiasaan mengumpulkan uang saja dari

pintu ke pintu, tapi lebih dari itu sebenarnya. Jimpitan ini bisa disebut langkah nyata, langkah awal yang mungkin kecil dari gotong royong dan juga solidaritas masyarakat. Ibaratnya semua masyarakat kemudian punya rasa untuk saling menjaga dan melindungi. Jadi, mulai dari rumah perumah itu punya kontribusi buat Jimpitan ini.” (**wawancara, 24 Februari 2025**)

Dari pernyataan diatas, Pak Lilik ia sebagai perwakilan dari pengurus Tradisi Jimpitan di Dusun Tadahan menyampaikan bahwa bagi karang taruna, Tradisi Jimpitan ini tidak hanya sekedar kegiatan rutin mengumpulkan uang dari rumah ke rumah saja. Lebih dari pada itu, Jimpitan disini dipandang sebagai tindakan nyata dan wujud langkah awal meskipun kecil namun signifikan dalam mewujudkan suatu gotong royong dan solidaritas di tengah masyarakat. Analoginya adalah bahwa di setiap anggota masyarakat memiliki rasa ingin saling menjaga dan melindungi. Meskipun dalam jumlah yang kecil, setiap rumah tangga memiliki kontribusi untuk menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Intinya, Jimpitan dapat dilihat sebagai fondasi awal dalam membangun sistem dukungan sosial di tingkat masyarakat. Pak Lilik juga menambahkan bahwa:

“Hasil dari Jimpitan ini sendiri memang dalam bentuk uang yang kemudian di setorkan ke Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) sebagai dana dana darurat, yang kemudian digunakan untuk keperluan sosial, fasilitas kepemudaan, fasilitas umum gitu. Jadi ngga untuk karang taruna aja itu engga, tapi juga melihat kebutuhan warga masyarakat. Ya bisa dibilang dari kita untuk kita gitu.” (**wawancara, 24 Februari 2025**)

Pernyataan diatas menunjukkan mekanisme dari dana Jimpitan yang telah terkumpul diwujudkan dalam bentuk uang tunai, yang selanjutnya disetorkan ke dalam Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES). Hal ini yang menjadi fondasi dana darurat yang dapat diakses untuk mengatasi berbagai keperluan

yang bersifat sosial, dukungan pengembangan fasilitas Kepemudaan, serta memelihara dan meningkatkan fasilitas umum di dusun Tadahan. Sehingga, alokasi dana ini tidak terbatas pada kepentingan kelompok, melainkan secara komprehensif mencakup kebutuhan seluruh warga masyarakat. Prinsip yang mendasari dari pengelolaan Jimpitan inilah yang merupakan representasi dari semangat kebersamaan, yaitu kontribusi dari masyarakat yang kemudian dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan kesejahteraan secara menyeluruh. Pak Lilik juga memberikan imbuhan bahwa:

“Kalau disini, Jimpitan itu menyeluruh. Semua warga ikut berpartisipasi, dan penerima manfaatnya juga menyeluruh, siapapun yang sakit pasti jimpitan insidental langsung, tidak melihat pekerjaannya apa, sudah punya BPJS atau tidak, itu semuanya menyeluruh” (**wawancara, 24 Februari 2025**)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa tradisi Jimpitan di dusun Tadahan memiliki cakupan tanpa pengecualian. Ini menandakan bahwa partisipasi dalam jimpitan melibatkan seluruh warga, dan manfaatnya pun dapat dinikmati oleh siapa saja yang membutuhkan, khususnya dalam kondisi sakit, tanpa memandang latar belakang pekerjaan atau status kepemilikan BPJS. Diantara keterbatasan jaminan sosial formal seperti BPJS, jimpitan ini menjadi solusi akar rumput. Tradisi ini mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang mungkin belum terdaftar, atau bahkan belum memahami pentingnya jaminan sosial formal.

Adapun pernyataan dari pengurus Jimpitan dusun Tadahan terkait Jimpitan rutin mingguan disampaikan oleh Bapak Lilik Setiawan, S.Pd. sebagai berikut:

“Sebetulnya Jimpitan ini kan memang perdusun ya jatuhnya, di Tambakmerang juga semua dusun melakukan, tapi mungkin sistem yang dilakukan kan berbeda-beda. Ada yang per RT, ada yang dilakukan karangtaruna. Kalau disini di dusun Tadahan untuk Jimpitan rutin baru dari karang taruna, tapi yang insidental biasanya langsung ke RT masing-masing. Untuk Jimpitan rutin mulai ada usulan di tahun 2017 sebelum covid, dulu diinisiasi sama karang taruna.” (**wawancara, 24 Februari 2025**)

Bapak Lilik Setiawan, S.Pd. menyampaikan bahwa Tradisi Jimpitan ini menjadi sesuatu yang umum dilakukan di tingkat dusun, namun dengan variasi implementasi yang berbeda di setiap wilayahnya. Narasumber menjelaskan bahwa di desa Tambakmerang, seluruh dusun menjalankan praktik Jimpitan, meskipun dalam sistem pelaksanaannya terdapat perbedaan, seperti pengelolaan di tingkat RT maupun oleh organisasi karang taruna. Lebih lanjut, narasumber memberikan contoh yang spesifik di Dusun Tadahan, di mana Jimpitan rutin baru diinisiasi oleh karang taruna pada tahun 2017, sebelum adanya pandemi Covid-19, sementara Jimpitan insidental umumnya dikoordinasikan langsung melalui masing-masing RT. Hal ini menyoroti adanya fleksibilitas dan adaptasi praktik Jimpitan terhadap struktur organisasi dan kebutuhan spesifik di setiap dusun, dengan pengelolaan yang dapat terpusat pada organisasi pemuda atau terdesentralisasi di tingkat unit terkecil dalam wilayah administratif dusun. Informasi tambahan juga disampaikan oleh ibu Sulastri, S.Pd sebagai berikut:

“Untuk pengelolaan Jimpitan di dusun Tadahan langsung ke Karang Taruna, tapi yang jimpitan sosial koyo wong loro opo nek orang meninggal itu langsung pak RT trus langsung diberikan ke orang yang membutuhkan. Jadi awal e karangtaruna ngambilin dari rumah-rumah gitu, terus langsung masuk bendahara, terus dimasukkan ke tabungan.

Karang taruna juga bekerjasama sama pihak ke 3 untuk dapet manfaatnya. Tabungannya di Girimarto juga si, yang dekat, masuknya di TAMADES”

Terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana Jimpitan didusun Tadahan, disini melibatkan partisipasi aktif karang taruna dan juga RT, serta melibatkan pihak ketiga. Narasumber disini menjelaskan bahwa pengelolaan Jimpitan rutin di Dusun Tadahan dilakukan secara terpusat melalui Karang Taruna. Prosesnya meliputi pengumpulan dana dari rumah-rumah warga oleh anggota Karang Taruna, yang kemudian diserahkan kepada bendahara untuk disimpan dalam tabungan. Tidak sampai disitu saja, Karang Taruna menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan manfaat dari dana yang terkumpul, yaitu tabungan Jimpitan ini ditempatkan di TAMADES (Tabungan Masyarakat Desa), sebuah lembaga keuangan yang berlokasi di kecamatan Girimarto. Di sisi lain, untuk jimpitan yang bersifat sosial, seperti bantuan untuk warga yang sakit atau meninggal, pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh ketua RT dan segera disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dan mekanisme yang berbeda antara pengelolaan jimpitan rutin yang bersifat kolektif dan jangka panjang oleh Karang Taruna, dengan jimpitan sosial yang bersifat responsif dan disalurkan secara langsung oleh RT. Ibu Sulastri, S.Pd juga memberikan imbuhan bahwa terdapat beberapa keberfungsian dari Jimpitan ini yaitu sebagai berikut:

“Kalau kegunaan atau fungsi Jimpitan sendiri macam-macam, misalnya untuk bakti sosial, untuk kegiatan kepemudaan dan untuk keperluan lainnya, kayak pasang lampu, konsumsi kegiatan, buat beli peralatan-peralatann juga” (17 Februari 2025)

Narasumber memberikan gambaran tentang beragamnya kegunaan dan fungsi dana yang terkumpul melalui praktik Jimpitan. Narasumber menjelaskan bahwa dana jimpitan tidak hanya diperuntukkan untuk satu tujuan spesifik, melainkan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang mendukung kesejahteraan sosial dan kemajuan komunitas. Beberapa contoh pemanfaatan dana jimpitan yang disebutkan meliputi kegiatan bakti sosial, yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk mendukung kegiatan kepemudaan, yang berperan penting dalam pengembangan generasi muda dan kemajuan desa. Narasumber juga mencontohkan penggunaan dana Jimpitan untuk keperluan praktis sehari-hari, seperti pemasangan lampu penerangan umum, penyediaan konsumsi untuk berbagai kegiatan, hingga pembelian peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau karang taruna di dusun.

Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa Tradisi Jimpitan ini sebagai contoh awal dari jaminan sosial universal. Meskipun dalam skala mikro, prinsip dasarnya sama, yaitu kolektivitas dan solidaritas untuk saling membantu menghadapi kesulitan. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas intrinsik untuk membangun sistem perlindungan sendiri, yang cenderung lebih dekat dengan warga dan lebih cepat tanggap terhadap kebutuhan mendesak di lingkungan mereka. Misalnya, saat terdapat warga sakit mendadak, atau menghadapi musibah

seperti kebakaran, atau bahkan untuk melunasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dana atau bantuan Jimpitan seringkali menjadi respons pertama dan tercepat yang mereka terima, sebelum bantuan dari skema formal tiba atau bahkan sebelum mereka menyadari adanya skema tersebut.

Maka, Jimpitan tidak hanya mengisi kekosongan saja, tetapi juga manifestasi intrinsik dari jalinan relasi sosial yang mendalam. Fleksibilitas dan kedekatan emosional dalam jimpitan tidak muncul secara kebetulan, melainkan berakar pada interdependensi antarindividu yang telah terbangun melalui interaksi sosial yang berulang dan kepercayaan timbal balik. Dalam konteks ini, partisipasi dalam jimpitan bukan semata-mata tindakan altruisme, melainkan juga cerminan kesadaran kolektif akan saling ketergantungan: bahwa kesejahteraan individu terkait erat dengan kesejahteraan komunal. Ini menunjukkan bahwa solidaritas yang terlekat secara sosial mampu menjadi fondasi esensial dalam mewujudkan jaminan kesejahteraan dan rasa aman yang komprehensif bagi setiap anggota masyarakat menawarkan fleksibilitas dan kedekatan emosional yang sulit ditiru oleh sistem formal.

b. Tradisi Jimpitan dalam konteks Solidaritas dan Jaringan Sosial sebagai Infrastruktur Sosial Alternatif

Jika ditinjau dari konteks pemenuhan solidaritas dan jaringan sosial sebagai infrastruktur sosial alternatif, tradisi Jimpitan sesungguhnya adalah inti dari solidaritas dan jaringan sosial yang kokoh, menjadikannya infrastruktur sosial alternatif yang tak ternilai harganya. Di tengah krisis atau

kesulitan, sistem ini dapat menjadi tulang punggung yang vital dalam masyarakat.

Sistem ini memiliki kekuatan inheren untuk menyatukan beragam elemen masyarakat. Organisasi keagamaan, dengan jaringan jemaahnya yang luas dan nilai-nilai kedermawanan yang kuat, bisa mengintegrasikan jimpitan ke dalam program sosial mereka, memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang. Demikian pula, sistem keluarga besar dan arisan, yang sudah lama menjadi tulang punggung dukungan informal, dapat diperkaya dengan semangat jimpitan. Ibu Yuliyawati, S.P. menyampaikan bahwa:

“Kalau Jimpitan di Gondanglegi itu ada macem-macem. Ada jimpitan kas ibu-ibu pengajian sing kui malah sepuluh ewu, kuwi bulanan. Ada yang harian, mingguan, bulanan. Jimpitan e per RT/RW karo PKK. Okeh ya, nek sing PKK nggo keagamaan iku sepuluh ewu sing nggo dusun dua ribu, dadine kan duabelas ribu. Keagamaan iku yo nggo kas masjid, mbayar ustadz, sok nggo pengajian kayak gitu. Jadi yo bulanan, nek sing insidensial iku anu, dansos, dana sosial, setiap ada kematian limabelas ribu nek orang sakit sepuluh ribu. Nek jimpitan di Gondanglegi per RT mbak, masing-masing RT ndue, enek Jimpitan dewe. Kegunaan e yo untuk kas RT, nggo pembangunan insfrastruktur, yo ngrabat yo gawe tuku gorong gorong ngono kui” (wawancara, 3 Maret 2025)

Menurut ibu Yuliyawati, S.P., Praktik Jimpitan di wilayah dusun Gondanglegi menunjukkan varian implementasi yang menarik, yakni berdasarkan kelompok dan tujuan penggunaannya. Narasumber telah mengidentifikasi beberapa jenis Jimpitan yang berlaku di masyarakat setempat. Hal ini, menunjukkan adanya fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi. Ini bukan sistem kaku, melainkan respons terhadap berbagai kebutuhan spesifik dalam komunitas. Solidaritas di sini terwujud dalam

kontribusi rutin, sekecil apapun itu, yang secara kolektif menciptakan sumber daya yang signifikan. Misalnya, jimpitan Rp10.000 untuk pengajian dan Rp2.000 untuk dusun yang totalnya Rp12.000 bulanan, atau bahkan Rp10.000 untuk kas ibu-ibu pengajian, merepresentasikan komitmen berkelanjutan dari individu untuk mendukung fungsi-fungsi sosial dan keagamaan bersama. Ini adalah wujud nyata dari solidaritas organik di mana setiap bagian masyarakat saling terkait dan berkontribusi untuk menjaga keutuhan sistem sosial.

Secara eksplisit memanfaatkan dan memperkuat jaringan sosial yang sudah ada. Keterlibatan ibu-ibu pengajian dan PKK menunjukkan bagaimana organisasi kemasyarakatan berbasis minat atau wilayah menjadi simpul penting dalam distribusi dan pengumpulan jimpitan. Pembagian berdasarkan RT/RW menegaskan sifat lokalistik dan partisipatif dari infrastruktur ini; setiap RT memiliki "jimpitan dewe," yang berarti jaringan sosial di tingkat terkecil pun diberdayakan untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Ini adalah contoh konkret bagaimana hubungan sosial yang terjalin erat antar tetangga dan anggota komunitas dimanfaatkan untuk menciptakan sistem dukungan yang efisien.

Selain itu, fungsi dana jimpitan mulai dari kas masjid, pembayaran ustaz, pengajian, pembangunan infrastruktur (rabat, gorong-gorong), hingga dana sosial (kematian, orang sakit) dengan jelas menunjukkan jangkauan luas dari infrastruktur sosial alternatif ini. Dalam menghadapi krisis individu (sakit, kematian) maupun kebutuhan komunal (pemeliharaan fasilitas umum),

jimpitan menyediakan mekanisme respons cepat dan berbasis komunitas yang mungkin tidak tersedia atau lambat melalui jalur formal pemerintah. Ini adalah bukti bahwa solidaritas dan jaringan sosial tidak hanya mengisi kekosongan, tetapi juga membangun resiliensi komunal yang memungkinkan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan secara mandiri dan kolektif. Di dusun Tadahan ini, disampaikan oleh Bapak Sudrajat Eko Pamuji, S.Pd. bahwa jimpitan insidental dilaksanakan pada saat terdapat masyarakat yang sakit sekaligus besaran jimpitannya yakni, sebagai berikut:

“Biasanya kalau di Tadahan ada warga yang meninggal jimpitannya sebanyak dua puluh ribu tidak menutup kemungkinan bisa lebih tapi yang pokok dua puluh ribu itu, misal ada yang sakit sebesar sepuluh ribu”
(wawancara, 18 Februari 2025)

Pernyataan di atas menyoroti bagaimana jimpitan di dusun Tadahan terdapat ketentuan nominal (Rp20.000 untuk meninggal, Rp10.000 untuk sakit) menunjukkan bahwa tradisi Jimpitan beroperasi sebagai bentuk dari respon cepat solidaritas yang terstruktur dan terukur. Ini bukan hanya simpati sesaat, melainkan komitmen kolektif yang terkoordinasi untuk memberikan dukungan finansial pada saat-saat paling rentan. Jumlah ini, meskipun relatif kecil bagi individu, akan menjadi signifikan ketika dikumpulkan dari seluruh anggota jaringan, mencerminkan kekuatan akumulatif dari kontribusi kecil. Kata "tidak menutup kemungkinan bisa lebih" juga mengindikasikan adanya fleksibilitas dan kapasitas untuk dukungan berdasarkan tingkat kebutuhan atau empati kolektif yang lebih besar, menunjukkan solidaritas yang dinamis dan bukan kaku.

Dilihat dari aspek jaringan sosial terlihat jelas dalam asumsi bahwa mekanisme ini sudah berjalan dan dipahami oleh warga Tadahan. Jimpitan dalam konteks ini berfungsi sebagai "jaring pengaman" informal yang diaktifkan secara otomatis ketika terjadi musibah dalam komunitas. Tentu ini menunjukkan bahwa terdapat ikatan sosial antarwarga sudah cukup kuat dan terjalin erat, memungkinkan aliran bantuan tanpa melalui birokrasi formal. Ketika seorang warga meninggal atau sakit, jaringan sosial inilah yang secara spontan memobilisasi sumber daya, membuktikan bahwa modal sosial yang tertanam dalam hubungan antarindividu dapat diterjemahkan menjadi dukungan material yang nyata dan cepat. Tak hanya itu, di Dusun Tadahan, juga disampaikan oleh bapak Lilik Setiawan, S.Pd. bahwa bakti sosial telah menjadi kebiasaan, sebagaimana berikut:

“Untuk persentase penggunaannya sebenarnya tidak ada acuan pasti, lebih kondisional, lihat keperluan saja. Paling nanti yang menjadi kebiasaan untuk baksos diabil setengah dari hasilnya, terus sasarannya juga terbatas sekitar 10-20 warga saja. Misal ada keperluan yang penting ada musyawarah antar anggota, nanti tiap akhir tahun juga ada laporan penggunaannya untuk apa saja sepeti itu” (**wawancara, 24 Februari 2025**)

Terkait dengan alokasi dana jimpitan tidak memiliki persentase penggunaan yang baku, melainkan bersifat kondisional dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Bapak Lilik Setiawan, S.Pd. menjelaskan bahwa tidak terdapat acuan pasti dalam menentukan berapa persen dana Jimpitan yang akan digunakan untuk setiap keperluan. Keputusan alokasi lebih didasarkan pada prioritas dan urgensi kebutuhan saat itu. Hal ini menunjukkan solidaritas di sini bukan sekadar kewajiban, tetapi kesediaan

untuk menyesuaikan alokasi sumber daya demi kepentingan bersama, mencerminkan adanya kepercayaan dan fleksibilitas dalam jaringan sosial tersebut. Ini memungkinkan respons cepat terhadap situasi mendesak, berbeda dengan sistem formal yang sering terhambat oleh birokrasi. Meskipun seperti hal tersebut, terdapat kecenderungan atau kebiasaan untuk mengalokasikan sekitar setengah dari total dana yang terkumpul untuk kegiatan bakti sosial, kebiasaan mengalokasikan setengah dari hasil jimpitan untuk bakti sosial (baksos) yang menysar 10-20 warga terbatas menunjukkan fokus pada solidaritas terarah. Meskipun sasarannya spesifik, hal ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan efektif dan berdampak nyata bagi kelompok yang paling membutuhkan dalam jaringan tersebut. Ini bukan sekadar sumbangan acak, melainkan upaya terkoordinasi untuk memberikan dukungan substantif kepada segmen tertentu dari komunitas, memperkuat ikatan sosial melalui tindakan konkret.

Adanya musyawarah antar anggota untuk keperluan penting dan laporan penggunaan dana di akhir tahun menegaskan sifat partisipatif dan akuntabel dari infrastruktur sosial ini. Musyawarah memastikan bahwa keputusan kolektif didasarkan pada konsensus, memperkuat rasa kepemilikan dan solidaritas horizontal. Laporan akhir tahun, meskipun informal, berfungsi sebagai mekanisme transparansi yang vital. Ini membangun dan menjaga kepercayaan antar anggota jaringan, yang merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan infrastruktur sosial alternatif ini. Tanpa akuntabilitas ini, solidaritas bisa memudar.

Tak hanya itu saja pernyataan menarik juga disampaikan oleh Sukatno, sekaligus pemberian contoh kasus kebakaran rumah yang terjadi di dusun Gondanglegi beberapa tahun yang lalu, ia menyampaikan bahwa:

“ndisik ke omah e mbah Iro kobongan kae yo terus golekne bantuan, ning aku lali piro, nek ora kleru ki sepuluh ewu pokok e, tapi yo okeh sing moro ngekek i bantuan langsung, pribadi ngono” (**wawancara, 27 Februari 2025**)

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa pada saat rumah Mbah Iro terbakar, masyarakat segera menginisiasi pengumpulan bantuan melalui jimpitan. Secara gamblang menggambarkan bagaimana solidaritas dan jaringan sosial beraksi sebagai infrastruktur sosial alternatif dalam menghadapi krisis personal. Solidaritas di sini terwujud dalam respons cepat dan spontan komunitas terhadap musibah yang menimpa Mbah Iro. Meskipun ada upaya pengumpulan dana kolektif (kemungkinan melalui jimpitan atau bentuk patungan lain, yang disebutkan "*sepuluh ewu pokok e*"), yang lebih menonjol adalah gelombang bantuan langsung dan pribadi. Ini menunjukkan adanya ikatan emosional dan rasa empati yang kuat di antara warga. Solidaritas ini tidak menunggu mekanisme formal, melainkan segera aktif begitu kebutuhan muncul, mencerminkan nilai kolektivisme yang mendalam. Singkatnya, kasus Mbah Iro yang rumahnya terbakar menunjukkan bahwa di masa krisis, solidaritas yang kuat dan jaringan sosial yang padat tidak hanya melengkapi, tetapi bahkan dapat mengungguli mekanisme formal dalam memberikan bantuan yang cepat, personal, dan

efektif. Ini adalah contoh nyata bagaimana masyarakat mampu membentuk sistem dukungan mandiri yang esensial.

Lebih ringkas, tradisi Jimpitan ini memiliki fungsi solidaritas terbukti sangat kuat dan adaptif. Keberadaan berbagai jenis jimpitan (harian, mingguan, bulanan) dengan alokasi dana untuk kebutuhan keagamaan, infrastruktur dusun, hingga dana sosial insidental (kematian, sakit) menunjukkan komitmen kolektif yang mendalam. Ini bukan sekadar sumbangan finansial, melainkan ekspresi kepedulian yang terlembaga secara informal, menjamin dukungan terus-menerus bagi anggota komunitas. Jaringan sosial berperan vital dalam menggerakkan jimpitan. Keterlibatan aktif ibu-ibu pengajian, PKK, dan pembagian per RT/RW menunjukkan bagaimana organisasi berbasis minat dan wilayah menjadi simpul penting dalam mobilisasi dan distribusi sumber daya. Kasus musibah Mbah Iro secara spesifik menyoroti efisiensi jaringan informal yang memungkinkan respons cepat dan bantuan langsung dari warga, melampaui mekanisme formal. Hubungan interpersonal yang kuat dan saling ketergantungan (*social embeddedness*) menciptakan jaring pengaman sosial yang fleksibel dan penuh empati.

c. Tradisi Jimpitan dalam konteks Ekonomi Moral dan Norma Timbal Balik di Komunitas Lokal

Tradisi Jimpitan ditinjau dari konteks ekonomi moral dan norma timbal balik di komunitas lokal, tradisi jimpitan merupakan perwujudan dari konsep "wajib membantu" yang telah diinternalisasi secara kolektif. Kewajiban

moral ini diturunkan turun-temurun, membentuk etos komunitas yang meyakini bahwa kesejahteraan individu tidak terlepas dari kesejahteraan bersama. Ini mencerminkan prinsip ekonomi moral, di mana keputusan dan tindakan ekonomi dipandu oleh pertimbangan etis dan norma sosial, bukan semata-mata oleh keuntungan rasional atau kapasitas materi. Ada semacam "kontrak sosial" tak tertulis yang mengikat anggota komunitas untuk saling menopang. Saudara Sukatno menyampaikan bahwa:

“ngene sa, jenenge uwong ki biasa. Dino iki sehat waras, urung tentu sesuk podo ngono kui. Jeneng e musibah ki ra enek sik reti, ra ngerti wayah, ra milih-milih. Reti-reti loro butuh obat opo mlebu RS kan yo butuh wong lio. Mugane enek jimpitan iki podo-podo membantu, sopo ngerti kene gentian dibantu. Intine lak kene rareti kedepan e to.”
(wawancara, 27 Februari 2025)

Narasumber memberikan pengakuan universal akan ketidakpastian hidup dan kerentanan manusia. Kesadaran ini menumbuhkan sebuah ekonomi moral yang mendalam di dalam komunitas. Artinya, partisipasi dalam jimpitan tidak didasari oleh perhitungan untung-rugi secara rasional, melainkan oleh pemahaman etis bahwa semua orang rentan terhadap musibah dan oleh karenanya memiliki kewajiban moral untuk saling membantu. Adanya jimpitan menjadi manifestasi konkret dari keyakinan bahwa solidaritas kolektif adalah benteng pertahanan terbaik terhadap ketidakpastian tersebut.

Kata "*Mugane enek jimpitan iki podo-podo membantu, sopo ngerti kene gentian dibantu*" secara eksplisit menunjukkan beroperasinya norma timbal balik yang kuat. Ini bukan tentang pertukaran langsung atau "hutang budi"

yang dihitung secara presisi, melainkan sebuah timbal balik difus dan jangka panjang. Individu berkontribusi bukan hanya untuk membantu orang lain saat ini, tetapi juga karena memahami bahwa mereka sendiri mungkin suatu saat akan membutuhkan bantuan serupa. Norma ini menciptakan sebuah "tabungan sosial" yang diakses saat darurat, memastikan bahwa setiap anggota komunitas memiliki jaring pengaman. Rasa aman ("*Intine lak kene rareti kedepan e to*") yang dirasakan partisipan berasal dari kepastian bahwa komunitas akan berdiri bersama mereka ketika musibah datang, didorong oleh pemahaman kolektif akan saling ketergantungan dan kewajiban moral untuk menopang satu sama lain. Selain itu, pernyataan terkait dengan norma timbal balik juga disampaikan oleh bapak Sudrajat Eko Pamuji, S.Pd yakni:

“sebenarnya di dusun kita tradisi Jimpitan masih terlihat kecil, tetapi penting keberadaannya. Ini menyangkut kebersamaan sama tolong menolong, karena pada dasarnya kita tidak tahu nasib kedepan.”
(wawancara, 18 Februari 2025)

Meskipun ukurannya mungkin "kecil" dalam hal nominal kontribusi, narasumber menekankan "penting keberadaannya." Praktik tradisi Jimpitan tidak diukur semata-mata dari akumulasi materinya, melainkan dari nilai-nilai sosial dan etis yang disokongnya. Kesadaran kolektif bahwa "kita tidak tahu nasib ke depan" menciptakan fondasi moral. Pemahaman akan kerentanan universal mendorong adanya kewajiban moral untuk saling membantu, bahkan dengan kontribusi yang kecil sekalipun. Jimpitan ini secara praktik bukan sekadar amal satu arah, melainkan investasi dalam sebuah sistem dukungan yang menjamin bahwa ketika individu atau

keluarga mengalami kesulitan, seperti yang diakui oleh frasa “kita tidak tahu nasib ke depan” akan ada komunitas yang siap menopang.

Aspek norma timbal balik sangat sentral di sini. Ketika seseorang berkontribusi pada jimpitan, ia tidak hanya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan saat ini, tetapi juga "menginvestasikan" dalam sebuah sistem di mana ia sendiri, atau anggota keluarganya, mungkin suatu hari akan menjadi penerima. Ini bukan timbal balik yang dihitung secara matematis atau segera, melainkan timbal balik yang bersifat difus dan jangka panjang, menciptakan siklus dukungan dan kepercayaan. Bantuan tidak hanya diberikan berdasarkan kemampuan finansial seseorang, tetapi didorong oleh kewajiban moral yang mendalam untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan kesejahteraan kolektif. Inilah yang menjadikan jimpitan sebuah mekanisme jaminan sosial yang resilien, karena ia disokong oleh fondasi etika dan relasional yang kuat di dalam komunitas lokal.

d. Tradisi Jimpitan dalam konteks Kesejahteraan Relasional: Ketergantungan pada Rasa Aman dalam Hubungan Sosial

Jimpitan memiliki dampak luar biasa dalam memberikan rasa aman bagi seluruh anggota komunitas. Rasa aman ini muncul dari kesadaran bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Baik itu sakit, kehilangan pekerjaan, atau bencana, ada jaring pengaman sosial yang siap menopang. Rasa aman ini bukan hanya tentang ketersediaan dana, tetapi juga tentang keberadaan dukungan sosial dan keterlibatan emosional dari komunitas masyarakat. Kehadiran dan dukungan emosional yang diberikan

oleh tetangga atau anggota kelompok pengajian, misalnya, dapat memberikan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada sekadar nilai uang atau barang.

Rasa aman yang diperoleh bukanlah dari kepastian finansial semata, melainkan dari pengetahuan bahwa dalam kesulitan, ada komunitas yang peduli dan siap menopang, secara materi maupun emosional. Ini menciptakan sebuah lingkungan di mana kesejahteraan individu terkait erat dengan kualitas hubungan sosial yang harmonis dan penuh dukungan. Mengetahui bahwa tetangga atau komunitas akan peduli dan siap membantu saat dibutuhkan, menumbuhkan ketenangan batin dan mengurangi stres akibat ketidakpastian hidup. Ini secara langsung meningkatkan kualitas hidup, karena individu dapat menjalani hari-hari mereka dengan lebih tenang. Disampaikan oleh Bapak Mino selaku masyarakat dusun Tadahan yang juga pernah mendapatkan bantuan sosial dari Tradisi Jimpitan ini, ia menyampaikan bahwa:

“Dadi Jimpitan iki roso nggo bareng-bareng, podo-podo urunan sitik-sitik nggo jogo-jogo nek enek sik kangelan, terus awak e kabeh masyarakat iso ngeroso aman nek lagi kangelan, koyo dene nek pas loro.”
(wawancara, 23 Februari 2025)

Ungkapan tersebut menegaskan bahwa Jimpitan bukan hanya sekedar praktik pengumpulan dana saja, melainkan manifestasi dari semangat solidaritas dan gotong royong masyarakat. Setiap anggota masyarakat berkontribusi sedikit demi sedikit, menciptakan semacam "tabungan sosial" atau jaring pengaman yang siap digunakan saat ada yang kesulitan. Hal ini

mencerminkan bentuk antisipasi kolektif terhadap ketidakpastian hidup. Poin krusialnya terletak pada "*awak e kabeh masyarakat iso ngeroso aman nek lagi kangelan, koyo dene nek pas loro*" (kita semua masyarakat bisa merasa aman kalau sedang kesulitan, seperti saat sakit). Ini menggarisbawahi bahwa tujuan utama jimpitan adalah memberikan rasa aman dan kesejahteraan emosional melalui hubungan sosial. Dampak paling signifikan dari Jimpitan adalah lahirnya rasa aman di kalangan masyarakat. Bapak Mino juga menunjukkan bahwa kesadaran akan adanya Jimpitan menumbuhkan keyakinan bahwa mereka tidak akan sendirian dalam menghadapi kesulitan, baik itu sakit, kehilangan pekerjaan, atau bencana.

Rasa aman ini melampaui sekadar ketersediaan dana melainkan juga mencakup dukungan sosial dan emosional. Mengetahui bahwa tetangga atau masyarakat akan peduli dan siap membantu saat dibutuhkan, mengurangi stres dan kecemasan akibat ketidakpastian hidup, sehingga secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan memungkinkan individu menjalani hari-hari mereka dengan lebih tenang. Oleh karena itu, Jimpitan adalah pilar penting bagi kesejahteraan psikologis dan sosial masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Yurina selaku masyarakat dusun Gondanglegi yang menyampaikan bahwa:

“rasane beda kalau ada Jimpitan. Masyarakat sini langsung bergerak misalkan ada yang memerlukan bantuan. *Jadi rasane aman kae mbak, ora ngroso dewe, okeh sing peduli istilah e*” (wawancara, 22 Februari 2025)

Secara gamblang narasumber menyampaikan bagaimana tradisi Jimpitan ini memberikan rasa aman di tingkatan personal. Rasa aman ini muncul

bukan hanya dari ketersediaan dana, melainkan dari keyakinan kuat bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan hidup, karena ada jaringan pengaman sosial yang proaktif yakni tetangga dan masyarakat dusun yang siap membantu.

2. Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Jimpitan Dalam Konteks Jaminan Sosial Tradisional

Tradisi Jimpitan, merupakan salah satu warisan budaya yang telah menjadi bagian yang penting dari kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan. Namun, perubahan sosial yang terjadi seperti urbanisasi, globalisasi dan perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh terhadap struktur dan dinamika masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan jaminan sosial. Pada hal ini, peneliti bertujuan mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap relevansi Tradisi Jimpitan dalam konteks jaminan sosial saat ini.

Tradisi Jimpitan memiliki nilai-nilai luhur seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama, yang memiliki potensi memperkuat jaminan sosial berbasis komunitas. Secara spesifik, peneliti ingin memahami persepsi masyarakat mengenai tradisi jimpitan, apakah jimpitan dipandang sebagai wujud solidaritas sosial murni yang melandasi gotong royong dan kebersamaan. Pandangan ini melihat jimpitan sebagai nilai luhur yang esensial. Alternatifnya, Jimpitan bisa dipersepsikan sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan mendesak, terutama bagi yang belum terjangkau sistem formal. Namun, ada pula kemungkinan Jimpitan dirasakan sebagai beban atau kewajiban tambahan, yang bisa dipengaruhi oleh aspek transparansi dan manfaat

yang dirasakan. Dalam mengkaji relevansinya dalam konteks jaminan sosial saat ini, Jimpitan juga dapat dipandang sebagai mekanisme adaptif lokal yang lebih responsif dan fleksibel dalam menghadapi krisis komunitas. Lebih jauh, peneliti akan menelaah Jimpitan sebagai upaya pembangun ketahanan komunitas yang mandiri, memperkuat ikatan sosial dan mengurangi ketergantungan eksternal. Serta peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Aspek manfaat yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dari jimpitan akan menjadi indikator penting. Selain itu, kondisi sosial ekonomi individu, norma dan nilai sosial yang kuat di dusun, serta efektivitas komunikasi dan informasi terkait Jimpitan juga akan dieksplorasi sebagai penentu utama persepsi masyarakat.

a. Persepsi Masyarakat dusun Gondanglegi tentang Tradisi Jimpitan dalam Konteks Jaminan Sosial Tradisional

Pandangan masyarakat dusun diawali oleh pernyataan dari oleh Ibu Surati selaku ibu RT di Dusun Gondanglegi, yakni:

“Soal Jimpitan ki yo apik, malah menurutku ora mbebanke masyarakat. Justru kuwi kan wujud gotong royong masyarakat sakiki. Nek seminggu sewu kan yo ora abot jan e, opo meneh sakiki sing merantau iso sasen mbayar e. Kayae ki sakiki malah bayare dadi siji perbulan limagewu, nek kui kan malah menakne pengurus e juga. Ndisik ki urung enek Jimpitan, nek enek sik loro opo sik perlu dibantu ki ndadak nariki duit nyang omah omah ngono, jan e ijik podo, tapi nek enek jimpitan coro dene dadi luh okeh bantuan e seko masyarakat” (wawancara, 21 Februari 2025)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa Tadisi Jimpitan adalah aksi baik yang tidak membebaskan masyarakat, melainkan merupakan salah satu bentuk gotong royong masyarakat terkini. Narasumber

juga memberikan contoh konkrit ringannya Jimpitan yakni sebesar seribu rupiah dalam kurun waktu satu minggu. Saat ini sistem Jimpitan dilakukan sebulan sekali dengan nominal lima ribu rupiah, tentunya hal ini dilakukan untuk mempermudah pengurus dalam pengelolaan hasil Jimpitan. Dari informasi diatas, dapat diketahui juga bahwa dari dulu saat masyarakat memerlukan bantuan, ketua RT yang akan berkeliling untuk menarik dana Jimpitan, tetapi dengan adanya Jimpitan per minggu ini justru semakin memperbanyak jangkauan jamian sosial masyarakat. Ibu Surati juga menambahkan bahwa terdapat tantangan yang dapat menjadi peluang untuk tradisi Jimpitan di dusunnya yakni:

“Jimpitan iki apik jan e, tantangan e yo pie carane ben iso luhi luas, ora gur seko RT/RW tok, sokor-sokor iso di enekne Jimpitan per karangtaruna kan iso nggo kas, nggo keperluan sosial mbarang to” (wawancara, 6 Maret 2025)

Narasumber memberikan pengakuan positif terhadap praktik Jimpitan yang menjadi topik pembahasan. Narasumber menyampaikan tantangan konstruktif yaitu bagaimana cara untuk memperluas praktik Jimpitan agar tidak hanya melibatkan RT/RW saja sebagai pengelolanya. Dengan penuh harap, narasumber memberikan ide konkrit dan visioner yaitu menginisiasi Jimpitan di bagi karangtaruna. Implementasi Jimpitan di tingkat akar rumput ini akan menghasilkan kemandirian kas yang signifikan, yang pada nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sosial di lingkungan masyarakat setempat yang lebih merata. Tak hanya itu, salah satu pemuda

karang taruna bernama Sukatno juga menanggapi adanya potensi tantangan lainnya, seperti pernyataan berikut:

“ngene sa, biasane ki nek enek urusan pemuda yo, kan Jimpitan urusan pemuda sik ngurus ngono lo, rumangsaku yo sik aktif ming kui-kui wae. Koyo sing semangat paling yo kae, sing ngoyak-oyak yok ae. Sesuk nek wis tuo pie opo sing kui-kui wae diganti pie, iso bingung gek are kepie. Kudune kabeh wong sing melu ki ndue roso nduweni, ora mung sak penak e. sing enom kudu di kek i kesempatan sinau pie carane ngatur ben Jimpitan ini ki tetep mlaku.” (**wawancara, 27 Februari 2025**)

Narasumber mengamati bahwa dalam urusan kepemudaan, termasuk pengelolaan Jimpitan ini yang berkaitan dengan kegiatan pemuda, hanya segelintir orang saja yang terlihat aktif dan bertanggung jawab. Narasumber merasa khawatir mengenai apa yang akan terjadi ketika generasi aktif ini menua atau tidak lagi terlibat, dan bagaimana regenerasi kepemimpinan akan berjalan jika tidak ada partisipasi yang lebih luas dari kalangan pemuda lainnya. Oleh karena itu, narasumber menyampaikan akan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap Jimpitan di antara seluruh anggota masyarakat, tidak hanya sekadar ikut serta tanpa tanggung jawab. Narasumber juga menyarankan agar generasi muda diberikan kesempatan untuk belajar dan terlibat dalam pengelolaan Jimpitan sejak dini, sebagai upaya untuk memastikan keberlangsungan tradisi ini di masa yang akan datang.

Selain pernyataan di atas, terdapat pandangan yang disampaikan oleh ibu Yurina selaku masyarakat yang turut berkontribusi dalam Tradisi Jimpitan ini, ia menyampaikan bahwa:

“Jimpitan ya, nek ditekoni soal Jimpitan neng deso kene ki menurutku yo apik, istilah e tidak memberatkan. Justru jimpitan iki gambaran saling bantu membantu. Dadi pie carane podo njogo masyarakat sik keno musibah, misal e loro masuk rumah sakit mondok, keperluan sosial, nek ora di nggo keperluan liane koyo agustusan nek ora pasang lampu dalan. Koyo ngene iki nek dewe gur sitik oleh e, tapi nek dilakoni barengan se deso yo lumayan hasil e.” (wawancara, 22 Februari 2025)

Dari pernyataan narasumber diatas, dapat diketahui bahwa narasumber memiliki pandangan bahwa Tradisi Jimpitan merupakan kegiatan yang baik dan tidak memberatkan. Alasan utama dari pernyataan tersebut yakni Jimpitan dianggap menjadi wujud dari tindakan saling membantu antar warga masyarakat seperti, digunakan dalam keperluan sosial, saat terdapat warga yang sakit atau masuk rumah sakit yang di desa lebih sering disebut *mondok* (lebih dari tiga hari), untuk keperluan mendesak seperti pemasangan lampu jalan, ataupun untuk kegiatan desa seperti perayaan agustusan jika tidak ada kebutuhan mendesak lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai aksi kecil apabila dilaksanakan sendirian, tetapi akan memiliki hasil yang besar jika dilakukan bersama.

b. Persepsi Masyarakat dusun Tadahan tentang Tradisi Jimpitan dalam Konteks Jaminan Sosial Tradisional

Terdapat pula padangan yang disampaikan oleh Bapak Mino selaku masyarakat desa yang juga pernah mendapatkan bantuan sosial dari Tradisi Jimpitan ini, ia menyampaikan bahwa:

“Terus terang yo, soal Jimpitan iku yo seneng, ketulungan banget, nek pas wayah setor Jimpitan yo ora dadi abot wong gur sewu seminggune. Justru malah dadi welas asih e tonggo teparo, simbah kan gur karo simbok tok, dadi kerep oleh bantuan. Arep o awak e dewe yo melu urun Jimpitan, tapi awak e dewe yo ngerasakne manfaat e pas lagi susah. Dadi Jimpitan iki

roso nggo bareng-bareng, podo-podo urunan sitik-sitik nggojogo-jogo nek enek sik kangelan, terus awak e kabeh masyarakat iso ngeroso aman nek lagi kangelan, koyo dene nek pas loro.” (wawancara, 23 Februari 2025)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa, masyarakat yang mendapatkan manfaat dari Tradisi Jimpitan pun tidak merasa berat dalam skala penarikan uang seminggu dengan jumlah seribu. Narasumber juga menyapaikan bahwa senang bisa terbantu dengan adanya Tadisi Jimpitan ini, selain itu narasumber melihat dengan adanya Jimpitan ini justru merupakan bentuk kasih sayang atau kepedulian masyarakat/tetangga sekitar. Dari pernyataan diatas, juga menggambarkan kondisi narasumber yang tinggal berdua dengan istrinya ini, kerap mendapatkan bantuan dari hasil Jimpitan. Meskipun turut berkontribusi dalam Jimpitan, narasumber juga merasakan manfaat saat dalam kesulitan seperti pada saat sakit. Narasumber melihat bahwa Tradisi Jimpitan ini merupakan wujud kebersamaan dan gotong royong yang dilakukan untuk mengantisipasi di masa yang sulit, sehingga masyarakat juga merasa aman saat berada di masa yang sulit seperti pada saat sakit.

Terdapat pernyataan dari Ibu Karmi selaku masyarakat desa yang juga pernah mendapatkan bantuan sosial dari Tradisi Jimpitan ini, ia menyampaikan bahwa:

“Seneng, dibantu seko Jimpitan iki. Jimpitan iki cen nulung banget pas lagi butuh. Ning yo ora terus ngejibke Jimpitan, sok sok nek kangelan yo diwangi anak putu. Jimpitan e ki gur sewu, tapi ora ngroso dadi beban, malah ketok roso seduluran e.” (wawancara, 25 Februari 2025)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, masyarakat yang mendapatkan manfaat dari Tradisi Jimpitan merasa senang, karena memang sangat membantu pada saat masyarakat berada di masa yang membutuhkan. Tetapi narasumber juga menyadari bahwa tidak baik jika terus bergantung dengan Jimpitan, maka beberapa kesulitan yang dialaminya akan dibantu oleh anak cucunya. Selain itu, narasumber juga tidak merasa berat atau menjadi beban jika harus membayar seribu perminggunya, hal ini justru membuat narasumber melihat eratnya kekeluargaan antar warga.

Beberapa pandanganterkait dengan kendala yang dihadapi dalam menjaga keberlangsungan tradisi Jimpitan juga diungkapkan oleh bapak Lilik Setiawan, S.Pd. sebagaimana berikut:

“Salah satu kendala yang dihadapi beberapa waktu ini adalah banyaknya pemuda yang bekerja dan merantau, sehingga praktik Jimpitan dari rumah ke rumah jadi kurang efektif. Karena itu, terus sekalian untuk menghemat tenaga sama waktu, Karang taruna memutuskan untuk menggabungkan pengumpulan Jimpitan dengan arisan Karang Taruna. Apa lagi ya, mengingat kesibukan para pemuda juga sih, terutama pada malam minggu karena bekerja, kuliah, atau kegiatan lainnya, kami juga membuat keputusan untuk melaksanakan kegiatan ini satu kali dalam sebulan.”
(wawancara, 24 Februari 2025)

Pernyataan narasumber tersebut secara tidak langsung mengungkapkan adanya pergeseran dalam metode pelaksanaan tradisi Jimpitan sebagai bentuk respons terhadap perubahan demografi dan dinamika sosial masyarakat, khususnya di kalangan pemuda dusun. Merantau menjadi salah satu faktor signifikan yang mengurangi ketersediaan pemuda di rumah, yang sebelumnya mungkin menjadi tenaga penggerak utama dalam pengumpulan Jimpitan dari rumah ke rumah. Sebagai solusi adaptif, integrasi Jimpitan ke

dalam wadah arisan Karang Taruna dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga partisipasi dan efisiensi pengumpulan dana. Langkah ini tidak hanya menyederhanakan proses pengumpulan, tetapi juga memanfaatkan momentum pertemuan rutin arisan untuk tujuan yang lebih luas. Selain itu, perubahan frekuensi pelaksanaan Jimpitan menjadi sebulan sekali merupakan pengakuan atas keterbatasan waktu dan tenaga, terutama mengingat aktivitas rutin pemuda di luar desa, seperti bekerja, menempuh pendidikan tinggi, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan rekreasi di luar rumah, yang seringkali mencapai puncaknya di akhir pekan. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan tradisi Jimpitan agar tetap relevan dan berkelanjutan di tengah perubahan gaya hidup dan mobilitas penduduk, dengan mengutamakan efisiensi dan partisipasi yang lebih terstruktur melalui mekanisme arisan bulanan. bapak Lilik Setiawan, S.Pd. juga menambahkan bahwa tantangan tidak hanya itu saja, tetapi:

“Di pengelolaan dana Jimpitan, terutama waktu jumlahnya lumayan banyak dan peruntukannya macem-macam, bisa jadi muncul masalah antara pemuda dan warga. Namanya uang banyak orang, dari awal siapa ngapain, keputusannya gimana, bisa aja ada yang ngerasa kok gini kok gitu. Makanya, penting banget tuh semuanya diinfokan, biar nggak ada salah paham. Solusinya ya itu tadi, musyawarah buat kesepakatan bersama minimalisir konflik.” (**wawancara, 24 Februari 2025**)

Terkait dengan kendala tradisi Jimpitan, bapak Lilik Setiawan, S.Pd. juga menyoroti tentang adanya kerawanan konflik yang bersumber dari kejelasan mengenai peran masing-masing pihak dan mekanisme pengambilan keputusan sejak awal. Ketidakjelasan ini dapat memicu perasaan tidak adil atau ketidakpuasan di antara anggota Karang taruna baik pemuda maupun

bagi warga masyarakat lainnya yang turut berkontribusi dalam Tradisi Jimpitan. Oleh karena itu, narasumber menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan dana Jimpitan agar tidak terjadi kesalah pahaman. Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, yang diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan dana Jimpitan. Pernyataan narasumber ini dapat digaris bawahi bahwa pengelolaan dana komunal yang baik memerlukan partisipasi aktif, komunikasi terbuka, dan mekanisme pengambilan keputusan yang disepakati bersama untuk menjaga keharmonisan antar generasi dalam komunitas.

c. Persepsi Pemerintah Desa Terhadap Relevansi Tradisi Jimpitan dalam Konteks Jaminan Sosial Saat Ini

Persepsi pemerintah desa terhadap relevansi tradisi Jimpitan diawali oleh bapak Sudrajat Eko Pamuji, S.Pd selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Tambakmerang, yang menyatakan:

“Nek dari saya selaku bagian dari pemerintah desa sangat mendukung karena kegiatan-kegiatan atau masalah yang berkaitan dengan pendanaan di dusun dapat dilaksanakan/diatasi, misal kegiatan sosial, lomba agustusan dan juga kegiatan Pordus (pesta olahraga antar dusun), walaupun ada yang mendapat bantuan dari dana desa tapi tidak bisa mencakup semua, sehingga masih membutuhkan swadaya masyarakat, nah fungsi dari jimpitan ini sebagai bentuk swadaya masyarakat yang tidak membebani masyarakat karena pelaksanaannya dilakukan seminggu sekali dengan nominal yang kecil” (**wawancara, 18 Februari 2025**)

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa menyampaikan dukungan terhadap adanya tradisi Jimpitan di tingkat Dusun

ini. Dukungan ini berdasarkan pada efektivitas tradisi Jimpitan sebagai mekanisme pendanaan alternatif untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan di dusun, seperti kegiatan sosial, perayaan kemerdekaan dan juga pesta olahraga antar dusun. Meskipun alokasi dana desa sebenarnya tersedia, namun seringkali tidak dapat mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa tradisi jimpitan memiliki peran sebagai solusi partisipatif yang tidak memberatkan bagi masyarakat karena pelaksanaannya rutin seminggu sekali dengan nominal yang kecil. Pemerintah desa mengakui bahwa nilai strategis tradisi Jimpitan dalam melengkapi sumber pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sosial masyarakat. Pernyataan dari perangkat desa tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan dari kepala desa Tambakmerang, bapak Aris Wahyu Supriyanto yang menyatakan:

“Sebagai kepala desa, saya melihat tradisi Jimpitan memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks jaminan sosial kita saat ini. Meskipun zaman telah mengalami perubahan-perubahan dan jaminan sosial formal sudah ada, tetapi semangat gotong royong dan saling membantu, mendasari Jimpitan tetap sangat relevan. Tradisi Jimpitan ini, mengajarkan kita tentang kepedulian terhadap sesama dan pentingnya berbagi, nilai-nilai ini yang menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kuat dan solider. Dalam keadaan jaminan sosial formal belum sepenuhnya merata atau mencukupi di desa, tradisi jimpitan inilah yang dapat menjadi mekanisme informal yang efektif untuk membantu warga yang membutuhkan, menciptakan jaringan dukungan yang kuat di tingkat desa. Jadi, menurut saya, mengintegrasikan nilai-nilai luhur Jimpitan ini ke dalam upaya penguatan jaminan sosial saat ini dapat menjadi langkah yang bijaksana untuk membangun sistem yang lebih inklusif dan berakar pada kearifan lokal.” (**wawancara, 3 Maret 2025**)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kepala desa Tambakmerang menyampaikan persepsinya bahwa Tradisi Jimpitan ini memiliki relevansi

yang signifikan dalam jaminan sosial saat ini. Esensi dari gotong royong dan solidaritas masyarakat dalam praktik Jimpitan dipandang penting, meskipun lanskap sosial ekonomi telah mengalami transformasi serta hadirnya jaminan sosial formal. Beliau menggarisbawahi adanya potensi Jimpitan sebagai mekanisme informal yang efektif dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Kepala desa berpendapat bahwa, pengintegrasian nilai-nilai fundamental jimpitan ke dalam upaya penguatan jaminan sosial saat ini berpotensi menghasilkan sistem yang lebih inklusif, tangguh, dan terhubung dengan kearifan lokal, sekaligus dapat memperkuat kohesi sosial dan kepedulian masyarakat umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Tradisi Jimpitan Sebagai Jaminan Sosial Di Desa Tambakmerang Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tradisi Jimpitan Sebagai Jaminan Sosial di Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan analisis terhadap serangkaian wawancara yang telah dilakukan di Desa Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dapat di tarik kesimpulan bahwa tradisi Jimpitan bertransformasi menjadi sebuah sistem jaminan sosial tradisional yang tumbuh dari masyarakat sendiri, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, dan memegang peranan penting dalam memantapkan solidaritas sosial serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Jimpitan tidak sekadar pada aktivitas rutin pengumpulan dana mikro dari rumah tangga ke rumah tangga. Lebih dari pada itu, tradisi Jimpitan diinterpretasikan sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai gotong royong dan solidaritas yang inheren dalam struktur sosial masyarakat setempat. Ditinjau dari empat konteks jaminan sosial tradisional dari Mumtaz et al, (2024), tradisi Jimpitan ini paling menonjol dalam konteks “Solidaritas dan Jaringan Sosial sebagai Infrastruktur Sosial Alternatif”. Jimpitan bukan sekadar sistem pengumpulan dana, melainkan sebuah manifestasi dinamis dari solidaritas kolektif yang adaptif, terbukti dari ragam jenis jimpitan

yang merespons kebutuhan spesifik komunitas, mulai dari kebutuhan keagamaan, pembangunan infrastruktur, hingga dana sosial darurat bagi individu yang sakit atau meninggal.

Lebih lanjut, jimpitan secara efektif memanfaatkan dan memperkuat jaringan sosial yang sudah ada di tingkat akar rumput, seperti ibu-ibu pengajian, PKK, dan pembagian per RT/RW. Jaringan-jaringan ini berfungsi sebagai saluran vital untuk mobilisasi sumber daya dan penyebaran informasi, memungkinkan respons yang cepat dan personal terhadap musibah. Meskipun aspek ekonomi moral dan norma timbal balik juga inheren dalam praktik ini, dimensi solidaritas yang aktif dan jaringan sosial yang berfungsi sebagai tulang punggung dukungan di luar jalur formal adalah ciri paling dominan yang menjadikan jimpitan sebagai infrastruktur sosial alternatif yang tangguh di desa Tambakmerang.

2. Persepsi masyarakat terhadap relevansi tradisi Jimpitan dalam konteks jaminan sosial saat ini, serta persepsi pemerintah desa terkait tradisi Jimpitan.

Temuan analisis persepsi masyarakat dan pemerintah desa terhadap relevansi tradisi Jimpitan dalam konteks jaminan sosial saat ini, masyarakat secara kolektif mengapresiasi tradisi Jimpitan sebagai sebuah manifestasi turun-temurun dari gotong royong yang tetap aktual dan memiliki arti penting dalam pemenuhan kebutuhan jaminan sosial di tingkat kemasyarakatan. Persepsi ini didasarkan pada keyakinan bahwa Jimpitan tidak memberatkan secara ekonomi, mengingat kontribusi yang relatif kecil dan rutin, serta memberikan dampak nyata dalam meringankan beban sosial dan ekonomi individu maupun keluarga yang menghadapi kesulitan. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa terdapat

kesamaan antara warga dengan pihak pemerintah desa. Bahwa, tradisi Jimpitan saat ini tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kebudayaan, tetapi juga sebagai cara informal yang efektif untuk memberikan perlindungan sosial. Praktik ini dianggap penting dan memberikan kontribusi besar dalam mempererat hubungan antar warga serta meningkatkan kesejahteraan bersama di tengah kehidupan modern. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat masyarakat yang melihat adanya tantangan juga kendala dalam pelaksanaan tradisi Jimpitan seperti: akibat perubahan demografi dan dinamika sosial masyarakat, khususnya di kalangan pemuda, kerawanan konflik akibat ketidakjelasan peran dan mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana Jimpitan juga menjadi kendala di kemudian hari, serta tantangan untuk memperluas cakupan pengelolaan Jimpitan di luar RT/RW atau PKK dengan ide untuk menginisiasinya di tingkat lebih muda, yakni karangtaruna dusun Gondanglegi.

Secara keseluruhan, menjaga keberlangsungan tradisi Jimpitan ini memerlukan adaptasi terhadap perubahan sosial, pengelolaan yang transparan dan partisipatif, upaya regenerasi kepemimpinan, serta potensi perluasan cakupan pengelolaan agar tradisi ini tetap relevan dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan analisis yang telah dijelaskan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat berdasarkan hasil temuan penelitian ini. Berikut saran-saran yang telah disampaikan:

1. Pengembangan model jimpitan yang adaptif dan inovatif. Adanya tantangan perubahan demografi dan gaya hidup, perlu dilakukan eksplorasi model-model Jimpitan yang lebih fleksibel serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemanfaatan teknologi untuk pengumpulan dan pengelolaan dana, atau integrasi dengan platform digital, dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan partisipasi.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Untuk meminimalisir potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, praktik pengelolaan dana Jimpitan perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaporan rutin kepada masyarakat mengenai pengumpulan dan penggunaan dana, baik secara periodik maupun insidental. Pemanfaatan media komunikasi desa atau forum pertemuan warga dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi ini.
3. Strategi regenerasi dan pelibatan generasi muda. Mengatasi tantangan akan kurangnya partisipasi aktif pemuda, tentu memerlukan strategi yang terencana. Pelibatan pemuda ini dapat mencakup program sosialisasi tentang nilai dan manfaat Jimpitan kepada generasi muda, memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam kepengurusan dan pengelolaan, serta mengintegrasikan

Jimpitan ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan kepemudaan yang relevan. Pendidikan informal dan pendampingan dari tokoh masyarakat atau pengurus senior dapat menjadi metode yang efektif.

4. Promosi dan pertukaran pengetahuan antar dusun. Mengingat adanya variasi praktik Jimpitan antar dusun, pemerintah desa dapat memfasilitasi forum pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar pengelola Jimpitan di tingkat dusun. Ini dapat menjadi sarana untuk saling belajar, mengadopsi praktik-praktik baik, dan mengatasi tantangan bersama-sama.

Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, antara lain:

1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana. Pemanfaatan teknologi dan model pengelolaan yang inovatif akan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penyaluran dana, serta memastikan dana tersebut tepat sasaran.
2. Meningkatnya Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat. Struktur pengelolaan yang jelas, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tradisi Jimpitan, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan.
3. Terciptanya regenerasi pengelola jimpitan. Pelibatan generasi muda akan memastikan keberlanjutan tradisi ini di masa depan dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap nilai-nilai gotong royong.
4. Meningkatnya kohesi sosial dan solidaritas masyarakat. Pengelolaan Jimpitan yang partisipatif dan transparan akan mempererat hubungan antar warga dan memperkuat modal sosial di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Nurhadi, dkk. (2024). *Jaminan Sosial Di Indonesia: Sejarah, Teori, Dan Tantangan Masa Depan*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional*. Timur Putra Mandiri.
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
- Johannes, Ferry. 2003. *Jaminan Sosial bagi Warga Tidak Mampu*. Jakarta: Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri Lingkup Menko Kesra.
- Mudiyono. (2022). *Jaminan Sosial Berbasis Komunitas: Penguatan Mekanisme Gotong Royong dan Kekerabatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rys, V. (2011). *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar*. Pustaka Alvabet.
- Sakti, B. P. (2022). *Pemilihan Judul, Identifikasi Dan Rumusan Masalah*. Penerbit Adab.
- Suharto, Edi. (2009). *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.

- Sumarnonugroho, T. (1987). *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.
- Syarif, S., & Firdaus. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing
- Tang, Mahmud, dkk. (2005). *Kajian Sekuritas Sosial Bagi Keluarga Nelayan Miskin Di Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Baru-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara*. Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial Depsos RI.

Jurnal

- Aco, F., & Widane, G. R. (2018). Pengembangan Social Security Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Social Dalam Mega Proyek New Yogyakarta International Airport. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 2(1).
- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. *Yustisia*, 4(3), 558-580.
- Fadiah, R. (2024). Pengaruh Sistem Upah dan Jaminan Sosial terhadap Kesejahteraan Pakerja Perkebunan Kelapa Sawit KJP Cipta Prima Sejahtera di Desa Saka Tamiang. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 310-319.
- Firman, F. (2018). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
- Harsono, W. (2014). Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(2), 131-146.
- Hasanah, S. A. N., Agustina, D., Ningsih, O., & Nopriyanti, I. (2024). Teori Tentang Persepsi dan Teori Atribusi Kelley. *CiDEA Journal*, 3(1), 44-54.

- Hasyim, M. (2014). Pelestarian Tradisi Uang Jimpitan di Lingkungandusunngepuh Lor, Desa Banyusidi, Pakis, Magelang, Jawa Tengah. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, 3(03), 151-154.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Maftuchan, A., Hoelman, M. B., & Fanggidae, V. (Eds.). (2016). *Transformasi kesejahteraan: pemenuhan hak ekonomi dan kesehatan semesta*. Prakarsa.
- Mawardi, M. F., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Gotong Royong Sebagai Fondasi Moral Budaya: Perspektif Hukum Dan Keharmonisan Sosial. *PROSIDING MIMBAR JUSTITIA*, 1(1), 207-232.
- Muchlashin, A dan Hempri S. “Arisan Sokongan Jaminan Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa Gondang Purbalingga Jawa Tengah” (*Jurnal Masyarakat dan Desa* Vol. 3. No. 2, Desember 2023, Hal 81-99). Diakses 09 Januari 2025 pukul 12.42 WIB
- Mumtaz, Z., Enworo, O. C., & Mokomane, Z. (2024). A Case for the Inclusion of Informal Social Protection in Social Policy Theory and Practice—Lessons From Nigeria and Pakistan. *Journal of Asian and African Studies*, 00219096241249975.
- Nahar, A. N. Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Tradisi Nganten Mubeng Gapura Desa Loram Kabupaten Kudus. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 01-10.
- Pertiwi, A. B., Ali, H., & Sumantyo, F. D. S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan: Analisis Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan

Pelanggan (Literature Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(6), 582-591.

Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.

Setiawan, H. H. (2019). Mermuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) di Indonesia. *Sosio Informa*, 5(3).

Setyawan, B. W., & Nuro'in, A. S. (2021). Tradisi Jimpitan Sebagai Upaya Membangun Nilai Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Jawa. *DIWANGKARA: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya Jawa*, 1(1).

Simbolon, M. (2007). Persepsi dan kepribadian. *Jurnal ekonomis*, 1(1), 52-66).

Skripsi

Gani, A. H. 2001. Hubungan antara Jaminan Sosial dengan Kesejahteraan Karyawan Kampanye (Studi Deskriptif pada PT Perkebunan Nusantara X PG Ngidirejo Kediri).

Putri, Cahya Katri Kartika, Bahrudin. 2013. Eksistensi Jaminan Sosial Informal bagi Masyarakat di Pemukiman Liar. (Skripsi, Universitas Gajah Mada)

Rizal, M, R. 2018. Komplememtari Jaminan Sosial Tradisional dan Modern Dalam Menangani Resiko. (Skripsi, Universitas Gajah Mada)

Tesis

Anggraini, Nita. 2013. Keterbatasan Jaminan Sosial berbasis masyarakat dalam pembiayaan kesehatan korban lumpur lapindo di Desa besuki Timur. (Tesis, Universitas Gajah Mada)

Disertasi

Rohmah, K. N. R. (2023). *Tradisi jimpitan di Desa Simogirang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).

Artikel:

Amalia, Mita, H. 2022. Kematian satu keluarga di Kalideres: Mengapa kasus ini begitu menarik perhatian publik hingga memicu spekulasi liar?. BBC News Indonesia, 16 November. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1w6pxld7pzo>

Cendrawasih, Kodam. 2023. Puluhan warga Yahukimo dilaporkan meninggal karena kelaparan, mengapa bencana ini terus berulang di Papua?. BBC News Indonesia, 27 Oktober. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv207n5y9pdo>

Mega, Deti, P. 2021. Penerimaan Bansos Tak Rata, Menko PMK: Data Belum Sempurna. Kompas.com, 18 Agustus. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/18/10504061/penerimaan-bansos-tak-rata-menko-pmk-data-belum-sempurna?page=all>.

Lain-lain

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 ayat (1)

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA

Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu :

Identitas Informan

Nama :

Usia :

Alamat :

Jenis Pekerjaan :

Lama Bekerja :

Pertanyaan :

1. Apakah Bapak/Ibu dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan tradisi Jimpitan?
2. Seberapa sering Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan Jimpitan?
3. Apa motivasi Bapak/Ibu berpartisipasi dalam kegiatan Jimpitan?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama dari tradisi Jimpitan?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat dari tradisi Jimpitan?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima manfaat dari tradisi Jimpitan? Jika iya, bagaimana bentuk bantuan tersebut?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat perubahan pelaksanaan tradisi Jimpitan?
8. Apakah perubahan tersebut berdampak positif/negatif terhadap masyarakat?
9. Bagaimana tradisi Jimpitan membantu meningkatkan rasa solidaritas dan gotong royong di desa?

10. Apakah Bapak/Ibu merasa tradisi Jimpitan memberikan rasa aman dan nyaman karena adanya jaminan tradisional?
11. Apakah ada perubahan atau peningkatan kualitas hidup yang Anda rasakan secara pribadi atau yang Anda lihat di masyarakat setelah adanya tradisi Jimpitan?
12. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi Jimpitan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada?
13. Siapa saja yang dapat merasakan manfaat tradisi Jimpitan ini?
14. Apakah ada pengalaman pribadi yang membuat Bapak/Ibu memiliki pandangan tertentu tentang Jimpitan?
15. Bagaimana menurut Bapak/Ibu perbandingan antara tradisi Jimpitan dengan program jaminan sosial yang sudah ada?
16. Bagaimana tradisi Jimpitan dapat dikembangkan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini?
17. Bagaimana kendala dan tantangan dalam menjaga keberlangsungan tradisi Jimpitan?
18. Apakah ada ide atau inovasi yang dapat diterapkan pada tradisi Jimpitan?
19. Apa saja harapan dan rencana kedepan dalam keberlanjutan tradisi Jimpitan?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA TRADISI JIMPITAN

Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu :

Identitas Informan

Nama :

Usia :

Alamat :

Jenis Pekerjaan :

Lama Bekerja :

Pertanyaan :

1. Sejak kapan tradisi Jimpitan dimulai di desa ini?
2. Apakah ada perubahan yang signifikan dalam bentuk ataupun tujuan Jimpitan dari waktu ke waktu?
3. Bagaimana struktur organisasi pengelola tradisi Jimpitan?
4. Siapa yang bertanggung jawab terhadap tradisi Jimpitan ini?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana Jimpitan?
6. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam tradisi Jimpitan?
7. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Jimpitan?
8. Bagaimana cara pengumpulan dana Jimpitan?
9. Apakah ada ketentuan khusus mengenai besaran dana Jimpitan?

10. Untuk apa saja dana Jimpitan digunakan?
11. Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana?
12. Bagaimana cara menentukan siapa yang membutuhkan bantuan melalui Jimpitan?
13. Bagaimana cara memastikan bahwa semua warga masyarakat, mendapatkan manfaat dari Jimpitan?
14. Bentuk perlindungan sosial apa saja yang diberikan melalui tradisi Jimpitan?
(misalnya, bantuan ekonomi, dukungan saat sakit, dll)
15. Apakah ada jenis kebutuhan dasar tertentu yang menjadi fokus utama dalam tradisi Jimpitan di desa ini?
16. Bagaimana tradisi jimpitan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar?
17. Bagaimana tradisi Jimpitan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa ini?
18. Indikator kualitas hidup apa saja yang menurut Anda dipengaruhi oleh tradisi Jimpitan? (misalnya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan)
19. Apakah ada perubahan atau peningkatan kualitas hidup yang Anda lihat di masyarakat setelah adanya tradisi Jimpitan?
20. Apakah ada transparansi dalam pengelolaan dana?
21. Apakah ada laporan keuangan yang rutin disampaikan kepada masyarakat?
22. Bagaimana tradisi jimpitan berkontribusi pada peningkatan jaminan sosial di desa?
23. Apakah ada nilai-nilai atau praktik dalam tradisi Jimpitan yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar warga?

24. Bagaimana Jaminan sosial dapat mempengaruhi interaksi sosial antar warga?
25. Apakah ada perubahan sosial di desa akibat adanya tradisi Jimpitan?
26. Apakah tradisi Jimpitan dapat memperkuat semangat gotong royong di masyarakat, sedangkan juga terdapat perubahan sosial yang terjadi?
27. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memepertahankan tradisi Jimpitan?
28. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?
29. Peluang apa saja yang dapat dikembangkan dari tradisi Jimpitan? (misal, Kerjasama dengan Lembaga lain, pengembangan program yang lebih inovatif)
30. Adakah potensi kolaborasi antara tradisi jimpitan dengan program pemerintah?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN *STAKEHOLDER*

Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal :

Waktu :

Identitas Informan

Nama :

Usia :

Alamat :

Jenis Pekerjaan :

Lama Bekerja :

Pertanyaan :

1. Apakah Bapak/Ibu dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan tradisi Jimpitan?
2. Apakah Bapak/Ibu juga terlibat dalam kegiatan Jimpitan?
3. Apakah pemerintah desa juga terlibat dalam tradisi Jimpitan?
4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tradisi jimpitan berkontribusi pada peningkatan jaminan sosial di desa?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah tradisi Jimpitan mampu memberikan perlindungan sosial, bagi masyarakat desa? (seperti, bantuan ekonomi, dukungan saat sakit, dll)
6. Menurut Bapak/Ibu apakah tradisi jimpitan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar?

7. Menurut Bapak/Ibu apakah tradisi Jimpitan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa ini?
8. Bagaimana dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan tradisi Jimpitan?
9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu perbandingan antara tradisi Jimpitan dengan program jaminan sosial yang sudah ada?
10. Apakah ada ide atau inovasi yang dapat diterapkan pada tradisi Jimpitan?

DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sulastri, S.Pd. pada tanggal 17 Februari 2025

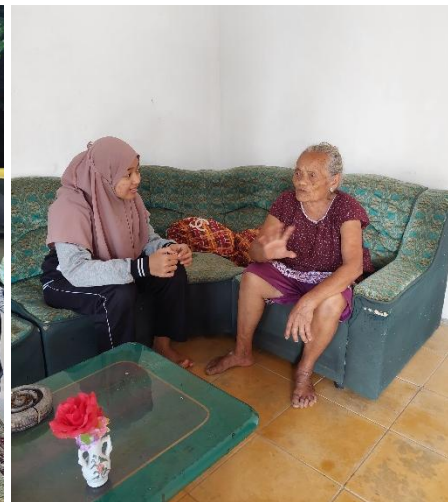


Dokumentasi penyerahan proposal penelitian, sekaligus wawancara dengan bapak
Sudrajat Eko Pamuji, S.Pd. pada tanggal 18 Februari 2025



Dokumentasi wawancara dengan ibu Yurina pada tanggal 22 Februari 2025 dan

Dokumentasi wawancara dengan bapak Mino pada tanggal 23 Februari 2025



Dokumentasi wawancara dengan Pak Lilik Setiawan, S.Pd pada tanggal 24 Februari

2025 dan Dokumentasi wawancara dengan ibu Karmi pada tanggal 25 Februari 2025



Dokumentasi wawancara dengan mas Sukatno pada tanggal 27 Februari 2025



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Aris Wahyu Supriyanto
dan ibu Yuliyawati, S.P pada tanggal 3 Maret 2025



Dokumentasi wawancara dengan ibu Surati pada tanggal 6 Maret 2025